

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN
2014-2024**



Oleh:

Mochammad Ridho Hesi Syaputra

NIM: 20313005

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh- sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2025

Penulis,



Mochammad Ridho Hesi Syaputra

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Faktor-Faktor Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi
D.I. Yogyakarta Tahun 2014-2024

Nama : Mochammad Ridho Hesi Syaputra
Nomor Mahasiswa : 20313005
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 24 Juni 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing



Mustika Noor Mifrahi SEI., MEK.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis faktor faktor tingkat pengangguran terbuka dikabupaten/kota provinsi DIY tahun 2014-2023

Disusun oleh : MOCHAMMAD RIDHO HESI SYAPUTRA

Nomor Mahasiswa : 20313005

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 05 Agustus 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Mustika Noor Mifrahi, S.E.I.,M.E.K.

Penguji : Jannahar Saddam Ash Shidiqie, SEI.,MEK.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

MOTTO

"Hidup adalah proses pembelajaran tanpa akhir; setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan setiap kegagalan adalah pijakan menuju keberhasilan."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, beribu kata syukur terucap atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, atas segala berkah dan kemudahan yang mengiringi perjalanan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya serta sebagai tanda perjuangan saya dalam menggapai cita-cita yang mulia. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang diberikan selama masa perkuliahan sehingga semua kemudahan dan kelancaran terus menyertai perjalanan kuliah saya sampai saat ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya dan teman-teman dekat saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya baik dalam keadaan suka maupun duka.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, tiada kata terindah yang bisa penulis sampaikan kecuali ucapan puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan hidayahNya. Shalawat teriring salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk bagi umat manusia dari jaman jahiliyah menuju ke jalan yang penuh peradaban seperti sekarang ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014-2024”**.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak yang memberikan doa dari awal hingga terselesainya tugas skripsi ini. Dalam hal ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayah Heri Susanto dan Bunda Sukeksi, serta adik saya Syifa Zalfa Zahra dan pacar saya Fasya yang tak henti-hentinya selalu mendukung dan mendoakan atas kemudahan dan kelancaran semua proses penyusunan skripsi ini, serta dengan setia selalu mendengar keluh kesah penulis dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan.
2. Ibu Mustika Noor Mifrahi SEI., MEK. selaku dosen pembimbing skripsi, yang selama masa bimbingan sudah meluangkan baik waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Sahabuddin Sidiq, S.E., MA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan Bapak Abdul Hakim., S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Program Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana.

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang dengan sabar telah memberikan pengajaran dan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, khususnya Ibu Mustika Noor Mifrahi SEI., MEK., Bapak Aminuddin Anwar S.E., M.Sc., dan Ibu Riska Dwi Astuti, S.Pd., M.Sc.
5. Teman-teman seperjuangan Saya, Aditya wp, Kepin, Mekong, dan Ardi Pratama yang selalu menemani masa-masa kuliah, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis dalam hal ini menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga selalu penulis harapkan saran, kritik, dan masukan yang membangun untuk perbaikan karya penulis selanjutnya dari semua pihak. Atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 24 Juni 2025

Penulis,

Mochammad Ridho Hesi Syaputra

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GRAFIK.....	4
DAFTAR TABEL	5
1.1 Latar Belakang Masalah	6
1.2 Rumusan Masalah.....	22
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	22
BAB II.....	24
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	24
2.1 Kajian Pustaka.....	24
2.2 Landasan Teori.....	25
Jenis-Jenis Pengangguran.....	26
2.2.1 Pengangguran.....	27
2.2.1.3 Pengangguran Siklikal (Konjungtural)	28
2.2.2 Upah Minimum	30
2.2.3 Investasi	32
1. Investasi Langsung (Direct Investment)	34
2. Investasi Tidak Langsung (Indirect Investment)	35
Dampak Investasi terhadap Pengangguran di D.I. Yogyakarta	36
2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	37
2.2.5 Pertumbuhan Ekonomi.....	40
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	41
2.3.1 Hubungan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	42

2.3.2 Hubungan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	42
2.3.3 Hubungan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	43
2.3.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	43
2.4 Kerangka Pemikiran	44
2.5 Hipotesis Penelitian.....	45
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	46
3.2 Definisi Variabel Operasional.....	51
3.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	51
3.2.2 Upah Minimum	52
3.2.3 Investasi	53
3.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	54
3.2.5 Pertumbuhan Ekonomi.....	54
3.3 Metode Analisis Data	55
3.3.1 Model Common Effect (CEM).....	56
3.3.2 Model Fixed Effect (FEM)	57
3.3.3 Model Random Effect (REM).....	58
3.4 Pemilihan Model.....	59
3.4.1 Uji Chow (Chow Test).....	59
3.4.2 Uji Hausman (Hausman Test)	60
3.4.3 Uji Lagrange Multiplier (LM).....	61
3.5 Pengujian Statistik.....	63
3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)	63

3.5.2 Uji F-statistic (Uji Kelayakan Model)	64
3.5.3 Uji t-statistik (Uji Parsial)	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2014-2024	3
Grafik 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2024	5
Grafik 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2024	6
Grafik 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2024.....	8
Grafik 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2024.....	12
Grafik 1.6 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2024	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2024 (dalam Rupiah).....	9
Tabel 1.2 Realisasi Investasi di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2024 (dalam Miliar Rupiah).....	10

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2024. Data yang digunakan adalah data sekunder yang sudah tersedia dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). variabel Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini Tingkat Pengangguran terbuka. sedangkan variabel independennya yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Investasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data panel (*pooled data*) dengan regresi *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, variabel Upah Minimum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, dan variabel Investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, dan variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2024.

Kata Kunci: Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Investasi, dan IPM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki ciri khas unik berupa keragaman suku, budaya, dan agama. Keragaman ini menjadi identitas yang mempersatukan masyarakat, meskipun juga menciptakan perbedaan dalam kondisi wilayah. Beberapa daerah telah berkembang pesat, sedangkan lainnya masih tertinggal. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk terus melakukan pembangunan yang berkeadilan demi tercapainya tujuan nasional, salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah (Susanti, 2021).

Sebagai negara berkembang, salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah permasalahan ketenagakerjaan. Dengan populasi yang terus meningkat, tekanan terhadap sistem ketenagakerjaan semakin besar. Berdasarkan data (BPS), populasi Indonesia meningkat dari 271,35 juta jiwa pada 2019 menjadi sekitar 277 juta jiwa pada 2023, dengan laju pertumbuhan penduduk yang stabil di angka sekitar 1,25 persen per tahun. Menariknya, sebagian besar populasi ini terdiri dari kelompok usia produktif, yaitu 15–64 tahun, yang menempatkan Indonesia dalam era bonus demografi. Bonus demografi merupakan kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk nonproduktif.

Keberadaan bonus demografi ini memberikan peluang besar bagi pembangunan ekonomi nasional. Jika tenaga kerja usia produktif dimanfaatkan secara optimal melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kompetensi, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing global. Namun, bonus demografi juga dapat menjadi beban jika tidak diiringi dengan kebijakan yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesempatan kerja (Seventeen et al., 2023).

Permasalahan pengangguran di Indonesia menjadi indikator utama tantangan dalam sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan

fluktuasi dari tahun ke tahun, terutama akibat dampak pandemi COVID-19. Pada 2020, TPT mencapai puncaknya di angka 7,07 persen sebagai akibat dari perlambatan ekonomi yang signifikan. Namun, pemerintah terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran. Pada 2021, TPT berhasil turun menjadi 6,49 persen, dan pada 2023, angka tersebut kembali menurun hingga sekitar 5,86 persen.

Upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran dilakukan melalui beberapa langkah penting. Pertama, penciptaan lapangan kerja baru dengan mendorong investasi di sektor padat karya dan industri kreatif. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan kerja, pendidikan vokasi, dan sertifikasi keterampilan. Ketiga, integrasi teknologi dalam berbagai sektor industri untuk menciptakan efisiensi dan membuka peluang kerja baru, khususnya di bidang teknologi informasi dan ekonomi digital (Firdaus et al., 2024).

Selain itu, program-program pembangunan infrastruktur juga memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, terutama di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan, seperti dana desa dan pemberdayaan ekonomi lokal, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan membuka peluang kerja di daerah tertinggal.

Grafik 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2014-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

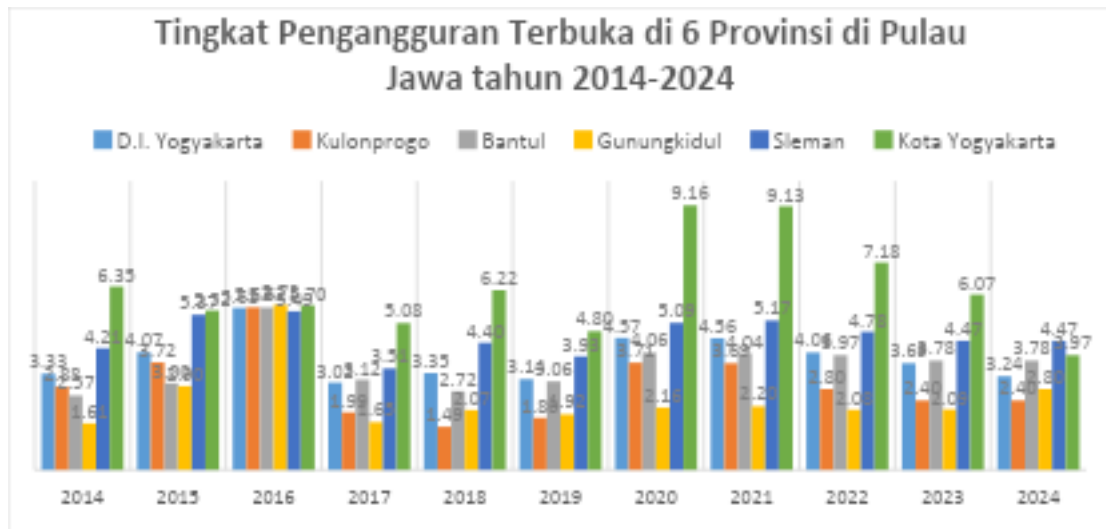
Ketika pengangguran mengalami peningkatan, tugas pemerintah adalah melakukan tindakan seperti menambah lapangan usaha. Namun jika pemerintah tidak melakukan penambahan lapangan usaha yang telah ada, akan mengakibatkan pengangguran terus meningkat. Peningkatan pengangguran menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga akan berakibat pada pertumbuhan tenaga kerja yang melebihi jumlah kesempatan kerja. Apabila situasi ini tidak segera diselesaikan, akan menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan. Masalah pengangguran sangat melekat pada negara berkembang, salah satunya Indonesia.

Tingginya pengangguran sangat berpengaruh pada perekonomian suatu negara. Angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik, karena adanya peningkatan taraf kualitas hidup penduduk dan pemerataan pendapatan,

sehingga kesejahteraan penduduk meningkat. Namun, tingkat pengangguran yang tinggi, seperti yang terlihat dari angka 7,07% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, menunjukkan pemborosan sumber daya yang berharga. Meskipun terdapat penurunan ke 4,82% pada tahun 2023, tantangan pengangguran tetap menjadi persoalan ekonomi yang serius.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau Jawa, sebagai pulau dengan jumlah penduduk yang amat banyak, yaitu sekitar 160 juta jiwa, merupakan representasi pembangunan di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa, meskipun menunjukkan penurunan dari puncak 8,45% di tahun 2014 menjadi 7,08% pada tahun 2023, masih menghadapi tantangan dan fluktuasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam penanganan pengangguran masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa masih belum kondusif atau belum baik. Sehingga belum menunjukan perkembangan yang signifikan dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2014 sampai tahun 2023 seperti yang tertera pada grafik 1.2.

Grafik 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

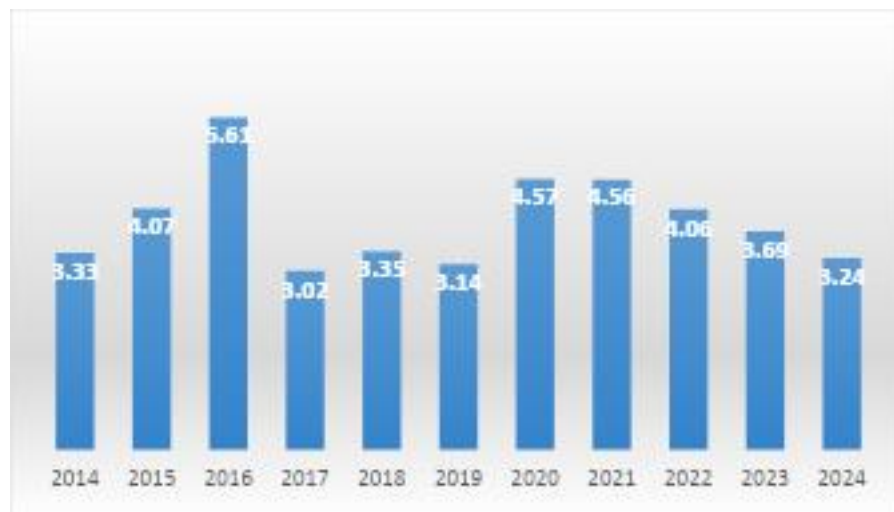
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di D.I. Yogyakarta menunjukkan tren fluktuatif dari 2014 hingga 2024, dengan peningkatan signifikan pada 2016 (5,61%) dan lonjakan akibat pandemi COVID-19 pada 2020 (4,57%) dan 2021 (4,56%). Setelah itu, terjadi tren penurunan secara bertahap hingga mencapai 3,24% pada 2024. Kota Yogyakarta mengalami tren pengangguran tertinggi, dengan puncak pada 2020 (9,16%) sebelum menurun drastis ke 3,97% pada 2024, menandakan pemulihan ekonomi yang pesat. Kulonprogo dan Gunungkidul cenderung memiliki TPT lebih rendah dengan tren stabil, meskipun Gunungkidul mengalami sedikit kenaikan pada 2024. Sleman dan Bantul menunjukkan pola naik-turun, dengan dampak pandemi yang cukup terasa, sebelum akhirnya menurun pada 2023-2024. Secara keseluruhan, tren TPT di DIY pasca-pandemi menunjukkan pemulihan dan peningkatan kondisi ketenagakerjaan.

Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi sepanjang periode adalah Jawa Barat, yang berada di atas 6% hingga 8% pada sebagian besar tahun. Jawa Tengah dan Banten juga memiliki tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya, meskipun cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, DKI Jakarta dan Yogyakarta secara konsisten memiliki tingkat pengangguran terbuka

yang lebih rendah dibandingkan provinsi lain, dengan angka di bawah 6% pada sebagian besar periode. Jawa Timur menunjukkan pola yang relatif stabil, dengan tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4%-5% sepanjang periode.

Terdapat penurunan signifikan pada tingkat pengangguran terbuka di sebagian besar provinsi pada tahun 2020, yang mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 dan berbagai intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan dinamika pasar tenaga kerja di Pulau Jawa, dengan provinsi-provinsi yang menunjukkan tren dan karakteristik yang berbeda-beda dalam hal tingkat pengangguran terbuka.

Grafik 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

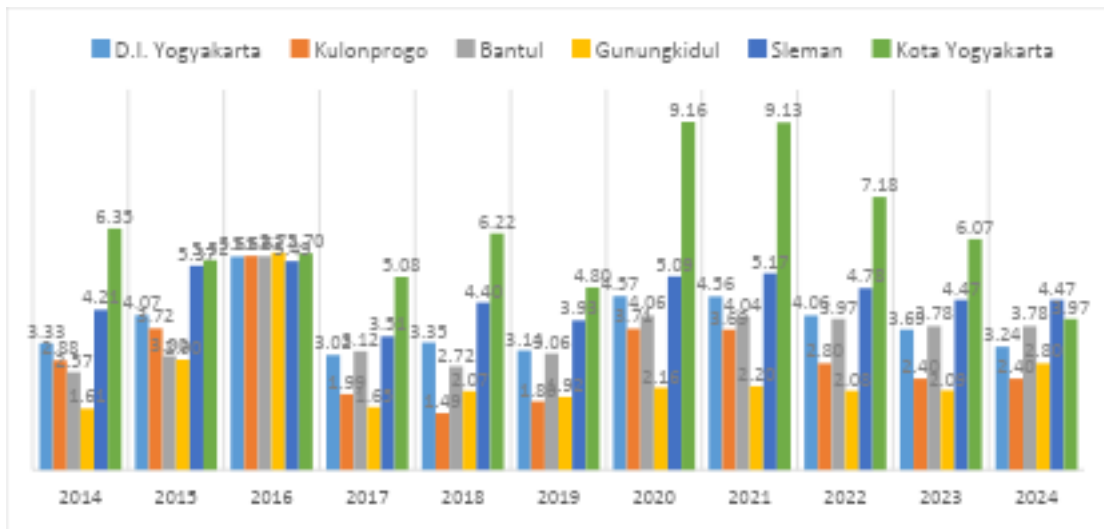
Berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka di Yogyakarta pada periode 2014-2024, analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di daerah ini tergolong rendah, dengan nilai yang selalu berada di bawah 6%. Pada tahun 2014, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 3,33%, mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan mencapai puncak tertinggi di 5,61% pada tahun 2016. Namun, setelah itu, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2017, di mana angka pengangguran turun menjadi 3,02%.

Tren stabilitas terlihat pada tahun-tahun berikutnya, dengan tingkat pengangguran tetap dalam kisaran 3-4% hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, Yogyakarta mengalami lonjakan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,57%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan kecenderungan untuk stabil pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing di 4,56% dan 4,06%. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan kembali, dengan tingkat pengangguran terbuka diperkirakan mencapai 3,24%.

Secara keseluruhan, meskipun mengalami fluktuasi, tingkat pengangguran terbuka di Yogyakarta menunjukkan tren yang positif dengan angka yang relatif terkendali. Stabilitas ini mencerminkan usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan dan ekonomi di daerah tersebut. Upaya lebih lanjut dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat sektor ekonomi sangat penting untuk menjaga tren positif ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.

Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki 5 Kabupaten/Kota termasuk dalam Provinsi yang memiliki banyak penduduk sekitar 3,7 juta jiwa dan merupakan representasi pembangunan di Indonesia yang masih mengalami kendala dalam mengatasi tingginya tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi D.I. Yogyakarta termasuk cukup tinggi ditunjukkan dengan grafik 1.4

Grafik 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka di Yogyakarta dan sekitarnya dari tahun 2014 hingga 2024, analisis deskriptif menunjukkan dinamika yang menarik dan beragam antar kabupaten/kota. Secara umum, tingkat pengangguran terbuka di Yogyakarta berada di bawah 6% sepanjang periode tersebut, mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang relatif stabil.

D.I. Yogyakarta menunjukkan fluktuasi signifikan, mulai dari 3,33% pada tahun 2014, meningkat menjadi 5,61% pada tahun 2016, sebelum kembali turun menjadi 3,02% pada tahun 2017, yang merupakan penurunan yang cukup drastis. Setelah itu, tingkat pengangguran berada di kisaran 3-4% hingga 2019, menunjukkan perbaikan dalam pasar kerja. Namun, pada tahun 2020, akibat dampak pandemi COVID-19, terjadi lonjakan tingkat pengangguran hingga mencapai 4,57%. Meskipun ada pemulihan pada tahun 2021 dan 2022, dengan angka 4,56% dan 4,06% masing-masing, proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan penurunan kembali menjadi 3,97%, yang mengindikasikan adanya pemulihan yang berkelanjutan.

Kulonprogo mencatatkan tingkat pengangguran terendah di antara kabupaten/kota lainnya, dengan angka paling tinggi 5,63% pada tahun 2016, sebelum turun signifikan menjadi 1,49% pada tahun 2018. Pada tahun 2020, angka ini meningkat menjadi 3,71%, namun masih berada di bawah 3% pada tahun 2023, menunjukkan stabilitas yang kuat. Bantul juga menunjukkan pola yang mirip, dengan tingkat pengangguran tertinggi pada 5,62% di tahun 2016, namun berhasil bertahan di kisaran 3-4% setelah itu.

Gunungkidul memiliki tingkat pengangguran terendah selama sebagian besar periode, dengan angka terendah 1,61% pada tahun 2014 dan puncak tertingginya hanya mencapai 5,72% pada tahun 2016. Sleman, di sisi lain, menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi, dengan puncak 5,49% pada tahun 2016 dan lonjakan ke 5,17% pada tahun 2021.

Kota Yogyakarta, sebagai pusat ekonomi dan pendidikan, memiliki tingkat pengangguran yang paling tinggi di antara semua daerah, mencapai puncaknya di 9,16% pada tahun 2020 akibat pandemi. Meskipun menunjukkan penurunan ke 6,07% di tahun 2023, angka ini masih mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam penciptaan lapangan kerja, terutama di wilayah perkotaan.

Tabel 1.1 Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2024 (dalam Rupiah)

Tahun	Kota Yogyakarta	Sleman	Bantul	Kulonprogo	Gunungkidul
2014	1.173.300	1.127.000	1.125.500	1.069.000	988.500
2015	1.302.500	1.243.700	1.237.700	1.173.000	1.108.249
2016	1.452.400	1.338.000	1.297.700	1.268.870	1.235.700
2017	1.709.150	1.572.200	1.498.500	1.373.700	1.382.000
2018	1.846.400	1.701.000	1.649.800	1.613.200	1.571.000
2019	2.004.000	1.846.000	1.790.500	1.750.500	1.705.000
2020	2.069.530	1.903.500	1.805.000	1.770.000	1.763.000
2021	2.153.970	2.001.000	1.916.848	1.904.275	1.900.000

2022	2.324.775	2.153.000	2.022.000	1.904.275	1.900.000
2023	2.324.775	2.153.000	2.022.000	1.904.275	1.900.000
2024	2.492.997	2.315.976	2.216.463	2.207.736	2.188.041

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami kenaikan setiap tahunnya di seluruh wilayah. Kota Yogyakarta selalu memiliki UMK tertinggi, meningkat dari Rp1.173.300 pada 2014 menjadi Rp2.492.997 pada 2024, dengan lonjakan signifikan pada 2017 dan 2024. Sleman juga menunjukkan tren kenaikan yang stabil dari Rp1.127.000 pada 2014 menjadi Rp2.315.976 pada 2024, dengan kenaikan terbesar pada tahun-tahun yang sama. Bantul mengalami pola serupa, meningkat dari Rp1.125.500 pada 2014 menjadi Rp2.216.463 pada 2024. Kulonprogo menunjukkan pertumbuhan bertahap dari Rp1.069.000 pada 2014 menjadi Rp2.207.736 pada 2024, meskipun sempat stagnan pada 2021 hingga 2023 sebelum meningkat kembali. Gunungkidul, yang selalu memiliki UMK terendah di DIY, juga mengalami peningkatan dari Rp988.500 pada 2014 menjadi Rp2.188.041 pada 2024, dengan lonjakan terbesar terjadi pada 2017 dan 2024. Secara keseluruhan, tren kenaikan UMK di seluruh wilayah menunjukkan pertumbuhan ekonomi serta penyesuaian terhadap kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

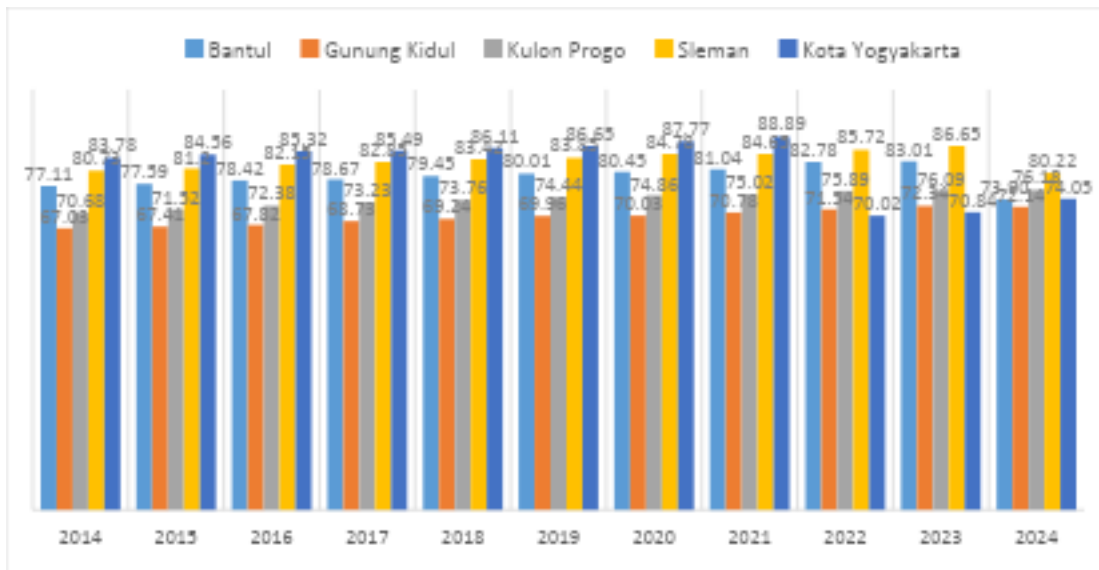
Tabel 1.2 Realisasi Investasi di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2024 (dalam Miliar Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bantul	875,980	611,263	134,794	104,835	84,560	20,085	57,500	112,000	486,380	394,800	727,122
Kabupaten Gunungkidul	0,159	0,171	0,184	84,358	122,927	185,647	216,272	282,834	475,350	237,570	159,028
Kabupaten Kulon Progo	0,876	1,057	1,086	1,203	5,782	10,651	11,000	12,000	13,000	122,000	354,780
Kabupaten Sleman	4,239	4,440	4,944	5,214	6,731	7,634	632,850	1,416	9,000	2.230,000	2.290,000
Kota Yogyakarta	3,745	4,942	5,118	5,307	6,269	6,806	7,500	8,000	8,500	862,400	867,600

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Berdasarkan data anggaran kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dari tahun 2014 hingga 2023, terlihat tren peningkatan anggaran yang signifikan di semua daerah, mencerminkan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Kabupaten Bantul menunjukkan pertumbuhan anggaran dari Rp 503.202.386 pada tahun 2014 menjadi Rp 1.600.000.000 pada tahun 2023, menandakan komitmen terhadap peningkatan infrastruktur. Kabupaten Gunungkidul, meskipun anggarannya terendah, mengalami kenaikan yang stabil dari Rp 159.027.019 menjadi Rp 550.000.000, menunjukkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo mengalami lonjakan luar biasa, terutama pada tahun 2018, dengan anggaran mencapai Rp 14.000.000.000 pada tahun 2023, kemungkinan besar karena proyek infrastruktur besar. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta juga mencatat pertumbuhan anggaran yang signifikan, mencerminkan kebutuhan investasi yang tinggi di daerah urban. Secara keseluruhan, peningkatan ini menunjukkan prioritas pemerintah untuk memajukan kualitas hidup masyarakat, meskipun tantangan dalam pencapaian hasil yang nyata tetap ada, terutama dalam hal efisiensi penggunaan anggaran dan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Selama 2014 sampai 2023 investasi selalu meningkat hal ini mengindikasikan bahwa lapangan pekerjaan semakin banyak dan beragam. Investor juga pastinya memiliki penilaian tersendiri untuk iya atau tidaknya mereka investasi dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Grafik 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2024

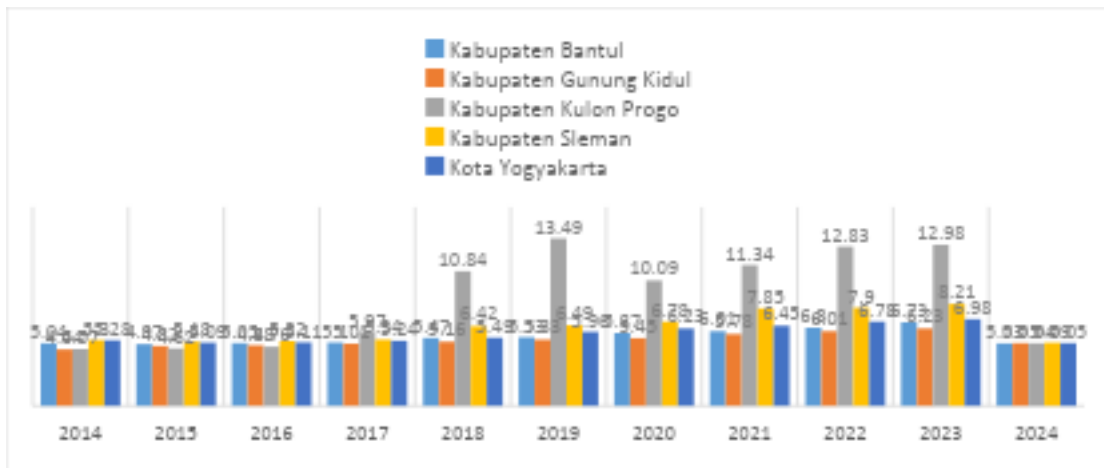


Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi D.I. Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2014 hingga 2023, mencerminkan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta secara konsisten memiliki IPM tertinggi, yang menandakan kualitas hidup masyarakatnya yang lebih baik dibandingkan wilayah lain. Kabupaten Sleman mencatat peningkatan dari 80,73 pada tahun 2014 menjadi 86,65 pada 2023, sementara Kota Yogyakarta memimpin hingga tahun 2021 dengan IPM mencapai 88,89. Namun, pada tahun 2022 terjadi anomali data di Kota Yogyakarta, di mana IPM-nya turun drastis menjadi 70,02, yang tampaknya merupakan kesalahan data karena bertolak belakang dengan tren sebelumnya. Sebaliknya, Kabupaten Gunung Kidul memiliki IPM terendah sepanjang periode, meskipun mengalami peningkatan dari 67,03 pada 2014 menjadi 72,34 pada 2023. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo juga mencatat pertumbuhan stabil dalam IPM mereka, masing-masing meningkat menjadi 83,01 dan 76,09 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, peningkatan IPM di semua wilayah menunjukkan adanya progres pembangunan manusia yang baik, meskipun beberapa wilayah, seperti Kabupaten Gunung Kidul, membutuhkan

perhatian lebih untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup penduduknya. Menunjukan bahwa pemerintah daerah sungguh-sungguh dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) karena besarnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM) suatu daerah akan berdampak pada rendahnya jumlah pengangguran. Begitu juga ketika indeks pembangunan manusia di daerah rendah akan dibarengi meningkatnya jumlah pengangguran dan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta adalah pertumbuhan ekonomi.

Grafik 1.6 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2014-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Pertumbuhan Ekonomi menurut Indryani et al., (2024) pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi pengangguran dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam sektor perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja artinya akan mengurangi pengangguran. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi turun maka penyerapan tenaga kerja akan sedikit dan pengangguran akan meningkat grafik 1.6 menunjukan Pertumbuhan Ekonomi atas dasar harga konstan di Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta periode 2014-

2023 dalam persentase diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi daerah Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman dan Kota Yogyakarta mengalami kenaikan per tahun. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi D.I YOGYAKARTA terkait dengan Upah Minimum, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi dengan judul. “Analisis Faktor-Faktor Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2014-2024”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi D.I Yogyakarta.
3. Menganalisis pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi D.I. Yogyakarta.
4. Menganalisis pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi D.I. Yogyakarta.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis serta memahami pengaruh Upah Minimum, Investasi, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta. Selanjutnya bisa dijadikan pertimbangan dalam menyusun suatu kebijakan oleh pemerintah dalam mengatasi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta atau hasil ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program S1 di Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Universitas Islam Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ardian et al., 2022), pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Dengan menggunakan data sekunder dari BPS periode 2015–2019 dan analisis regresi linier sederhana, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi memiliki arah hubungan negatif terhadap pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menurunkan angka pengangguran. Hasil ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu inklusif dalam menciptakan lapangan kerja, melainkan dipengaruhi pula oleh faktor struktural lain seperti kualitas tenaga kerja, kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar, serta daya serap sektor ekonomi yang dominan. Temuan ini memberikan landasan penting dalam kajian pustaka untuk menekankan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu determinan pengangguran terbuka perlu dianalisis secara hati-hati, karena kontribusinya terhadap penurunan pengangguran tidak selalu bersifat langsung maupun signifikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Suriati, 2020), tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat dipengaruhi oleh jumlah angkatan kerja, upah minimum, dan rata-rata lama sekolah. Dengan menggunakan data panel periode 2014–2018 serta analisis regresi model *fixed effect*, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, artinya semakin besar jumlah angkatan kerja maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran. Sebaliknya, upah minimum berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengangguran, yang mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum tidak serta merta mampu menurunkan angka pengangguran. Sementara itu, rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan tidak signifikan, yang menandakan bahwa peningkatan rata-rata pendidikan belum mampu secara efektif menekan pengangguran, bahkan cenderung

meningkatkan pengangguran karena kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. Secara simultan, ketiga variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, sehingga penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara penyediaan lapangan kerja, kebijakan pengupahan yang adaptif, serta peningkatan kualitas pendidikan agar dapat mengurangi tingkat pengangguran secara lebih efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Amelia & Samsuddin, 2025) konsumsi rumah tangga dan investasi dianalisis pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat periode 1995–2024 dengan menggunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, investasi justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sedangkan konsumsi rumah tangga tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini bertolak belakang dengan teori ekonomi konvensional, yang umumnya mengaitkan peningkatan investasi dengan penurunan pengangguran. Kondisi tersebut diduga disebabkan oleh dominasi investasi pada sektor padat modal yang minim penyerapan tenaga kerja, sehingga meskipun nilai investasi meningkat, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja relatif rendah. Sementara itu, dalam jangka pendek, mekanisme koreksi kesalahan (*error correction term*) terbukti signifikan, yang menandakan adanya proses penyesuaian cepat menuju keseimbangan jangka panjang ketika terjadi ketidakseimbangan. Penelitian ini menekankan pentingnya kualitas dan arah investasi agar lebih diarahkan pada sektor-sektor padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat berfungsi sebagai instrumen efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mahesa et al., 2024), indeks pembangunan manusia (IPM) terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Dengan menggunakan data panel provinsi pada periode 2012–2021 dan metode regresi *fixed effect model*, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan IPM yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, mampu menurunkan angka pengangguran terbuka secara konsisten. Hal ini mencerminkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia, maka semakin tinggi

pula peluang masyarakat untuk terserap dalam pasar kerja formal maupun informal. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pembangunan manusia bukan hanya aspek sosial, melainkan juga memiliki implikasi ekonomi yang strategis karena berhubungan langsung dengan peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan IPM melalui penguatan pendidikan, kesehatan, serta keterampilan kerja perlu dijadikan prioritas dalam upaya menekan tingkat pengangguran terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai kesehatan ekonomi suatu wilayah, termasuk di D.I. Yogyakarta. Pengangguran di wilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan (Widiyanto et al., 2021), tingkat pengangguran terbuka di D.I. Yogyakarta dipengaruhi oleh tingkat upah minimum regional (UMR) yang sering kali dianggap terlalu rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak, sehingga memengaruhi daya tarik tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, Utami, (2023) menemukan bahwa investasi memiliki peran signifikan dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun informal.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Yelvianti Tumba' Makko' & Abedneigo Carter Rambulangi, (2023) pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta yang didukung oleh sektor pariwisata memberikan kontribusi positif terhadap penciptaan lapangan kerja, namun dampaknya sering kali bersifat musiman dan tidak merata. Penelitian ini juga mencatat bahwa pengaruh sektor pendidikan sebagai salah satu keunggulan D.I. Yogyakarta belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga menciptakan kesenjangan keterampilan (Muhammad Hafizd Fauzi et al., 2024).

Selain itu, menurut studi yang dilakukan oleh Priatna, (2016), rendahnya tingkat industrialisasi di D.I. Yogyakarta menjadi salah satu penyebab utama terbatasnya lapangan kerja di sektor manufaktur, yang sering kali menjadi penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di wilayah lain. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah pergerakan demografi, sebagaimana diungkapkan oleh Ummah, (2019), yang mencatat bahwa tingginya arus

migrasi mahasiswa ke D.I. Yogyakarta menambah tekanan pada pasar kerja lokal, karena tidak semua lulusan pendidikan tinggi dapat segera diserap oleh dunia kerja.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengangguran di D.I. Yogyakarta adalah hasil interaksi kompleks dari faktor-faktor seperti kebijakan upah, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan struktur pasar kerja. Upaya untuk mengurangi pengangguran memerlukan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari peningkatan investasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, hingga penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.

2.2 Landasan Teori

Pengangguran terbuka merujuk pada kondisi di mana sejumlah individu yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi secara aktif mencari pekerjaan. Menurut Bato, (2023), pengangguran terbuka adalah salah satu bentuk pengangguran yang mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur sejauh mana perekonomian mampu menciptakan peluang kerja yang memadai bagi angkatan kerja yang tersedia.

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran terbuka dapat dianalisis melalui beberapa jenis pengangguran yang sering kali muncul dalam suatu wilayah. Menurut Blanchard (2021), pengangguran dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berikut:

1. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional terjadi ketika individu berada dalam masa transisi antara pekerjaan, seperti baru saja menyelesaikan pendidikan atau berpindah pekerjaan.

Masa ini biasanya bersifat sementara dan disebabkan oleh ketidaksempurnaan informasi di pasar tenaga kerja (Sinurat et al., 2022).

3. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. **Menurut laporan** Badan Pusat Statistik, (2024) di Yogyakarta, pengangguran struktural sering disebabkan oleh kurangnya pelatihan teknis bagi tenaga kerja, terutama dalam sektor industri kreatif dan teknologi informasi yang sedang berkembang pesat di wilayah tersebut.

4. Pengangguran Siklikal (Konjungtural)

Pengangguran siklikal dipengaruhi oleh fluktuasi dalam siklus ekonomi. Ketika perekonomian melambat, tingkat pengangguran cenderung meningkat akibat penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. **Handayani (2021)** menemukan bahwa pada masa pandemi COVID-19, pengangguran siklikal meningkat tajam di Yogyakarta, terutama dalam sektor pariwisata dan jasa, karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi.

5. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman terjadi dalam pekerjaan yang sifatnya tidak kontinu sepanjang tahun, seperti pekerjaan di sektor pertanian atau pariwisata (Bato, 2023).

2.2.1 Pengangguran

2.2.1.1 Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran friksional terjadi karena adanya waktu transisi antara pekerjaan. Hal ini biasanya dialami oleh individu yang baru memasuki pasar tenaga kerja, seperti lulusan baru, atau oleh mereka yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Gedeona, (2011) menjelaskan bahwa pengangguran friksional merupakan bentuk pengangguran yang tidak dapat dihindari dalam pasar tenaga kerja, terutama di wilayah yang memiliki banyak institusi pendidikan. Di D.I. Yogyakarta, sebagai kota pendidikan,

pengangguran friksional cenderung lebih tinggi selama periode kelulusan mahasiswa (Rahmawati, 2023).

2.2.1.2 Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Ini sering disebabkan oleh perubahan dalam struktur ekonomi atau teknologi. Pengangguran struktural dapat meningkat di wilayah yang mengalami transformasi industri. Di D.I. Yogyakarta, sektor pariwisata sebagai sektor dominan telah mengalami perubahan kebutuhan keterampilan, terutama pasca-pandemi COVID-19, ketika digitalisasi dalam pariwisata mulai meningkat. Pekerja yang tidak memiliki keterampilan digital cenderung lebih rentan menjadi penganggur struktural karena permintaan tenaga kerja di sektor pariwisata dan kreatif kini membutuhkan kemampuan teknologi (Rahmadini, 2023).

2.2.1.3 Pengangguran Siklikal (Konjungtural)

Pengangguran siklikal berkaitan dengan fluktuasi ekonomi yang disebabkan oleh siklus bisnis. Ketika ekonomi melemah, pengangguran cenderung meningkat karena perusahaan mengurangi produksi dan kebutuhan tenaga kerja. Di D.I. Yogyakarta, sektor pariwisata yang sangat bergantung pada jumlah wisatawan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh pengangguran siklikal. Menurut Anita & Jessica, (2023) selama masa pandemi COVID-19, jumlah wisatawan menurun drastis, menyebabkan banyak pekerja di sektor jasa dan pariwisata kehilangan pekerjaan. Data dari **BPS (2023)** menunjukkan bahwa pada tahun 2020, pengangguran siklikal meningkat sebesar 35% dibandingkan tahun sebelumnya.

2.2.1.4 Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi terjadi ketika kemajuan teknologi dan otomatisasi menggantikan pekerjaan manusia. Di D.I. Yogyakarta, sektor industri kreatif dan teknologi

yang terus berkembang mulai mengadopsi teknologi baru seperti sistem otomatisasi, yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual.

Mulyadi, (2022), pengangguran teknologi di Yogyakarta paling banyak terjadi di sektor manufaktur kecil dan menengah, di mana pekerja dengan keterampilan rendah tidak dapat bersaing dengan mesin otomatis. Peningkatan pengangguran ini menunjukkan perlunya program pelatihan ulang (reskilling) untuk tenaga kerja yang terdampak.

2.2.1.5 Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Pengangguran juga dapat dikategorikan berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti durasi pengangguran, usia, jenis kelamin, atau tingkat pendidikan.

- **Durasi Pengangguran:** Pengangguran jangka pendek biasanya disebabkan oleh alasan friksional, sedangkan pengangguran jangka panjang sering kali mencerminkan masalah struktural. Menurut Prawoto et al. (2023), sekitar 40% dari pengangguran di D.I. Yogyakarta adalah pengangguran jangka pendek, dengan durasi kurang dari 6 bulan.
- **Demografi:** Laporan dari BPS (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi di Yogyakarta terjadi pada kelompok usia 20–29 tahun, yang mayoritas adalah lulusan baru. Pengangguran pada perempuan juga cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki, terutama dalam sektor informal.
- **Pendidikan:** Tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang memengaruhi pengangguran. Data menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan pendidikan rendah lebih rentan terhadap pengangguran struktural, sedangkan mereka dengan pendidikan tinggi sering menghadapi pengangguran friksional.

2.2.2 Upah Minimum

Upah minimum memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika pasar tenaga kerja, karena merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan individu untuk memasuki atau meninggalkan pasar tenaga kerja. Sahputri et al., (2024) upah minimum adalah batasan paling rendah yang dapat diterima oleh pekerja untuk pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau kesepakatan industri. Kebijakan upah minimum bertujuan untuk melindungi pekerja dari pembayaran yang tidak layak dan memastikan adanya standar hidup dasar yang dapat dipenuhi melalui pendapatan mereka.

Namun, pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran bisa bersifat kompleks dan dapat berbeda tergantung pada kondisi pasar tenaga kerja serta tingkat upah yang ditetapkan. **Studi oleh** Suwardjono, (2017) menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum tidak selalu berdampak negatif pada tingkat pengangguran, terutama di sektor yang tidak terlalu sensitif terhadap biaya tenaga kerja, seperti sektor layanan atau pekerjaan berbasis keterampilan rendah.

Di sisi lain, Erdiansyah et al., (2022) menyatakan bahwa upah minimum yang terlalu rendah dapat mendorong pekerja untuk menolak pekerjaan yang ditawarkan, karena mereka merasa bahwa pekerjaan tersebut tidak sebanding dengan keterampilan dan waktu yang mereka investasikan. Di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, pekerja mungkin merasa tidak ada pilihan lain selain menerima pekerjaan dengan upah yang lebih rendah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengangguran jika pekerjaan yang ada tidak menarik bagi mereka. Di **D.I. Yogyakarta**, sebagai daerah dengan jumlah lulusan perguruan tinggi yang cukup besar, kebijakan upah minimum yang terlalu rendah dapat menyebabkan lulusan tersebut enggan menerima pekerjaan dengan gaji yang tidak sebanding dengan biaya hidup yang ada.

Pentingnya penetapan upah minimum juga terlihat dalam **studi oleh Dube et al. (2010)**, yang menunjukkan bahwa upah minimum yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja, mengurangi ketimpangan pendapatan, serta meningkatkan motivasi dan produktivitas tenaga kerja. Namun, jika upah minimum terlalu rendah, hal ini justru

dapat memperburuk ketidakpuasan pekerja dan menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara kebutuhan hidup dan pendapatan yang diterima.

Secara keseluruhan, kebijakan upah minimum yang tepat perlu mempertimbangkan keseimbangan antara memberikan insentif kepada pekerja untuk menerima pekerjaan yang ada dan memastikan bahwa perusahaan tidak terbebani dengan biaya tenaga kerja yang terlalu tinggi. Sebuah kajian oleh Indryani et al., (2024) menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan upah minimum yang adaptif terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan industri cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah serta menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih inklusif.

2.2.3 Investasi

Investasi adalah kegiatan penanaman modal atau pengeluaran dana pada suatu aset atau proyek dengan harapan untuk memperoleh keuntungan atau hasil di masa depan. Dalam konteks ekonomi, investasi dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya (baik itu uang, waktu, atau tenaga kerja) yang ditujukan untuk menciptakan barang atau jasa yang dapat meningkatkan nilai suatu entitas di masa yang akan datang.

Menurut Yokoyama & Mahardika, (2019) investasi merujuk pada pembelian barang modal, seperti mesin, peralatan, atau bangunan yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Sedangkan Erdiansyah et al., (2022) menyatakan bahwa investasi tidak hanya mencakup pembelian aset fisik, tetapi juga melibatkan investasi dalam bentuk sumber daya manusia, seperti pendidikan dan pelatihan, yang akan meningkatkan produktivitas di masa depan.

Dalam ekonomi makro, investasi biasanya dibagi menjadi dua kategori utama: **investasi riil** dan **investasi finansial**. **Investasi riil** adalah investasi yang berhubungan langsung dengan aset fisik seperti gedung, pabrik, atau infrastruktur yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Sementara **investasi finansial** lebih berfokus pada pembelian aset keuangan seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang.

Investasi memiliki tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kekayaan atau kapasitas produksi. Oleh karena itu, dalam konteks perusahaan atau negara, investasi bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, investasi dalam sektor **pariwisata**, **pendidikan**, atau **teknologi** tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi investor, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan, termasuk penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan kualitas hidup.

2.2.3.1 Jenis-Jenis Investasi

Investasi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Ulya et al., (2022) , investasi adalah pengeluaran untuk barang modal yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Terdapat dua jenis investasi utama yang dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja, yaitu **investasi langsung** dan **investasi tidak langsung**. Masing-masing jenis investasi ini memiliki dampak yang berbeda terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengangguran.

1. Investasi Langsung (Direct Investment)

Investasi langsung merujuk pada investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk membangun fasilitas produksi atau infrastruktur yang dapat langsung menghasilkan lapangan kerja. **Menurut OECD**, investasi langsung sering kali mencakup pembangunan pabrik, hotel, restoran, dan proyek infrastruktur besar lainnya. Dalam konteks D.I. Yogyakarta, investasi dalam sektor **pariwisata** dan **pendidikan** dapat menciptakan peluang pekerjaan yang signifikan. Sebagai contoh, pembangunan hotel, fasilitas rekreasi, dan pusat pendidikan tinggi akan membuka banyak posisi pekerjaan di sektor-sektor terkait, seperti manajer hotel, pekerja konstruksi, pengelola wisata, dan tenaga pengajar.

Investasi langsung juga sering disertai dengan transfer teknologi dan keterampilan, yang tidak hanya menciptakan pekerjaan baru tetapi juga meningkatkan kualitas

keterampilan tenaga kerja (Utami, 2023). Sebagai contoh, dalam sektor pariwisata, pelatihan di bidang perhotelan, pemandu wisata, dan layanan pelanggan akan memungkinkan tenaga kerja lokal untuk meningkatkan keahlian mereka dan beradaptasi dengan kebutuhan industri yang berkembang. Dengan demikian, investasi langsung berperan besar dalam mengurangi pengangguran di daerah seperti D.I. Yogyakarta, terutama bagi mereka yang terampil atau memiliki potensi untuk terlibat dalam sektor yang sedang berkembang.

Studi oleh Sanyoto et al., (2024) menunjukkan bahwa investasi langsung sering kali memiliki efek multiplier yang lebih besar, yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi yang lebih luas dan menciptakan lebih banyak pekerjaan dalam sektor-sektor pendukung lainnya. Selain itu, investasi semacam ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah dan menarik lebih banyak investasi dalam jangka panjang.

2. Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*)

Investasi tidak langsung mengacu pada pengeluaran yang tidak langsung menciptakan lapangan kerja secara langsung, tetapi dapat meningkatkan kapasitas produksi atau efisiensi sektor-sektor ekonomi tertentu. **Menurut** Riantoni et al., (2023) investasi tidak langsung biasanya berupa aliran modal atau dana yang digunakan untuk memperbaiki infrastruktur atau mendukung sektor-sektor yang sudah ada tanpa menambah kapasitas produksi secara langsung (Priatna, 2016). Contohnya adalah investasi dalam infrastruktur transportasi seperti pembangunan jalan, bandara, dan jaringan kereta api, yang mendukung kegiatan ekonomi tanpa langsung menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor tersebut.

Di D.I. Yogyakarta, investasi tidak langsung dapat mencakup pembangunan jaringan transportasi yang mendukung sektor pariwisata. Meskipun pembangunan infrastruktur ini tidak langsung menciptakan pekerjaan dalam sektor pariwisata, namun hal tersebut dapat meningkatkan daya tarik wisatawan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan menciptakan pekerjaan. Selain itu, peningkatan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan kampus dan fasilitas pendukungnya, juga

dapat meningkatkan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap kerja.

Menurut Saputri & Erdi, (2023), meskipun investasi tidak langsung tidak langsung menciptakan pekerjaan baru dalam jumlah besar, dampaknya tetap penting untuk mendukung sektor ekonomi utama dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Investasi semacam ini juga dapat membantu menurunkan biaya produksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Dampak Investasi terhadap Pengangguran di D.I. Yogyakarta

Dalam konteks D.I. Yogyakarta, investasi di sektor **pariwisata** dan **pendidikan** dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap tingkat pengangguran. **Investasi langsung**, seperti pembangunan hotel, restoran, dan fasilitas wisata, langsung menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor tersebut. Sementara itu, **investasi tidak langsung**, seperti pembangunan infrastruktur transportasi dan pendidikan, dapat meningkatkan kualitas sektor-sektor terkait dan memperluas daya tarik ekonomi daerah ini, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengurangan pengangguran.

Investasi dalam sektor pendidikan juga membuka peluang bagi lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, mengurangi pengangguran terdidik di D.I. Yogyakarta (Husain et al., 2024) Selain itu, sektor pariwisata yang terus berkembang akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja terampil, mulai dari pekerja hotel hingga pemandu wisata, yang dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran dalam jangka panjang (Putri et al., 2024).

Secara keseluruhan, baik investasi langsung maupun tidak langsung memiliki dampak penting terhadap penurunan pengangguran, dengan memberikan peluang kerja baru baik secara langsung maupun dengan memperbaiki kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dengan adanya kebijakan yang mendukung investasi di sektor-sektor

strategis seperti pariwisata dan pendidikan, D.I. Yogyakarta dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini.

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. IPM menggabungkan tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Ketiga dimensi ini dipilih karena dianggap sebagai faktor utama yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat, serta memberikan gambaran tentang kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Ngafifi, 2014). Menurut UNDP, IPM merupakan alat yang berguna untuk menilai seberapa baik suatu negara atau wilayah mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. IPM yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat menikmati pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih baik, dan pendapatan yang lebih tinggi, yang dapat berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan lapangan pekerjaan (NAIBORHU & Susanti, 2021).

2.2.4.1 Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM dihitung berdasarkan tiga indikator utama yang memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat:

1. Pendidikan: Pendidikan diukur dengan dua indikator utama, yaitu harapan lama sekolah (jumlah tahun yang diperkirakan dapat ditempuh oleh anak-anak di usia sekolah) dan rata-rata lama sekolah (rata-rata tahun yang telah ditempuh oleh masyarakat dewasa dalam pendidikan formal). Pendidikan yang baik dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, yang pada gilirannya mengurangi pengangguran dengan meningkatkan peluang kerja.
2. Kesehatan: Kesehatan diukur dengan harapan hidup saat lahir, yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Kesehatan yang baik

meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, karena individu yang sehat lebih mampu bekerja secara efektif dan berkelanjutan.

3. Pendapatan: Pendapatan diukur dengan menggunakan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Pendapatan yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan berpartisipasi dalam ekonomi, yang pada gilirannya membantu mengurangi tingkat pengangguran.

Ketiga indikator ini digabungkan untuk menghasilkan skor IPM, yang berfungsi sebagai indikator umum mengenai kesejahteraan suatu daerah. IPM yang lebih tinggi mencerminkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang lebih baik, yang berdampak positif pada kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran.

2.2.4.2 Keunggulan IPM Metode Baru

Metode baru dalam menghitung IPM menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode sebelumnya. Salah satu pembaruan signifikan dalam metode baru adalah peningkatan dalam pengukuran distribusi pendapatan dan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih akurat. Menurut BPS (2022), metode baru menggabungkan faktor-faktor yang lebih relevan dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih dinamis, memberikan hasil yang lebih mencerminkan realitas kesejahteraan masyarakat.

Beberapa keunggulan metode baru tersebut antara lain:

1. Penyesuaian dengan Perubahan Sosial dan Ekonomi: Metode baru memperhitungkan perkembangan sosial dan ekonomi yang lebih cepat, misalnya melalui penggunaan indikator yang lebih relevan dengan tren global seperti akses terhadap teknologi informasi atau partisipasi dalam ekonomi digital. Hal ini memberi gambaran yang lebih holistik tentang bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi pada pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan.

2. Peningkatan Akurasi dalam Pengukuran Kesejahteraan: Dengan memasukkan lebih banyak data dan variabel dalam perhitungan, metode baru memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan lebih tepat. Ini dapat membantu daerah untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi pengangguran dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3. Fokus pada Ketimpangan: IPM versi baru memberikan perhatian lebih besar pada ketimpangan di dalam masyarakat. Ketimpangan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pendapatan dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, dengan mengukur ketimpangan ini secara lebih mendalam, metode baru membantu untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih intensif guna menurunkan tingkat pengangguran.

2.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas ekonomi suatu wilayah dalam memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang positif sering kali dihubungkan dengan penurunan tingkat pengangguran, karena semakin berkembangnya perekonomian, semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta (Assanniyah & Setyorini, 2024). Di D.I. Yogyakarta, sektor-sektor kunci seperti pariwisata, pendidikan, dan sektor kreatif berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, sektor pariwisata di Yogyakarta mengalami perkembangan pesat dengan tingginya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara, yang mendorong permintaan terhadap layanan akomodasi, transportasi, serta sektor terkait lainnya. Hal ini membuka peluang kerja bagi tenaga kerja lokal, terutama di sektor jasa dan perdagangan (Ahsan et al., 2024).

Selain itu, sektor pendidikan di D.I. Yogyakarta juga terus berkembang dengan banyaknya perguruan tinggi yang menjadi pusat pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan lulusan siap pakai. Investasi yang terus mengalir dalam sektor ini juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru. Di samping itu, sektor-sektor lain

seperti industri kreatif dan teknologi informasi juga semakin berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berpotensi menurunkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor-sektor strategis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi pengangguran di daerah tersebut (Jainurakhma et al., 2023).

2.3 Hubungan Antar Variabel

Meneliti hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah kunci untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja. Di D.I. Yogyakarta, hubungan antara pertumbuhan ekonomi, upah minimum, investasi, dan Ineks Pembangunan Manusia sangat erat kaitannya dengan tingkat pengangguran terbuka. Menganalisis hubungan antar variabel ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang berperan dalam tingkat pengangguran dan bagaimana kebijakan dan kondisi ekonomi mempengaruhi dinamika tersebut.

2.3.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan lapangan pekerjaan secara langsung, karena perusahaan-perusahaan yang berkembang akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pasar. Nugraheni & Septiarini, (2017) menjelaskan bahwa dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya berhubungan dengan penciptaan lapangan kerja baru. Di D.I. Yogyakarta, pertumbuhan sektor pariwisata dan sektor-sektor kreatif yang terus berkembang dapat menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan. Sebagai contoh, peningkatan jumlah wisatawan di Yogyakarta mendorong permintaan akan layanan perhotelan, transportasi, dan kuliner, yang semuanya membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang kuat di D.I. Yogyakarta diperkirakan dapat menghasilkan penurunan pengangguran, karena semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia di berbagai sector.

2.3.2 Hubungan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Upah minimum berperan penting dalam mempengaruhi keputusan pengusaha dalam merekrut tenaga kerja. Menurut (Yelvianti 'Tumba' Makko' & Abedneigo Carter Rambulangi, (2023) , ketika upah minimum ditetapkan terlalu tinggi, perusahaan mungkin tidak mampu atau enggan untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja, karena mereka harus membayar lebih untuk setiap tenaga kerja yang dipekerjakan. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan dalam jumlah tenaga kerja yang diterima oleh perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat pengangguran. Sebaliknya, jika upah minimum terlalu rendah, pekerja mungkin tidak tertarik untuk melamar pekerjaan, yang juga dapat mengarah pada pengangguran. Di D.I. Yogyakarta, dengan sektor pariwisata yang dominan, ketidakseimbangan antara upah minimum dan ketersediaan pekerjaan di sektor tersebut dapat berpengaruh besar terhadap tingkat pengangguran.

2.3.3 Hubungan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

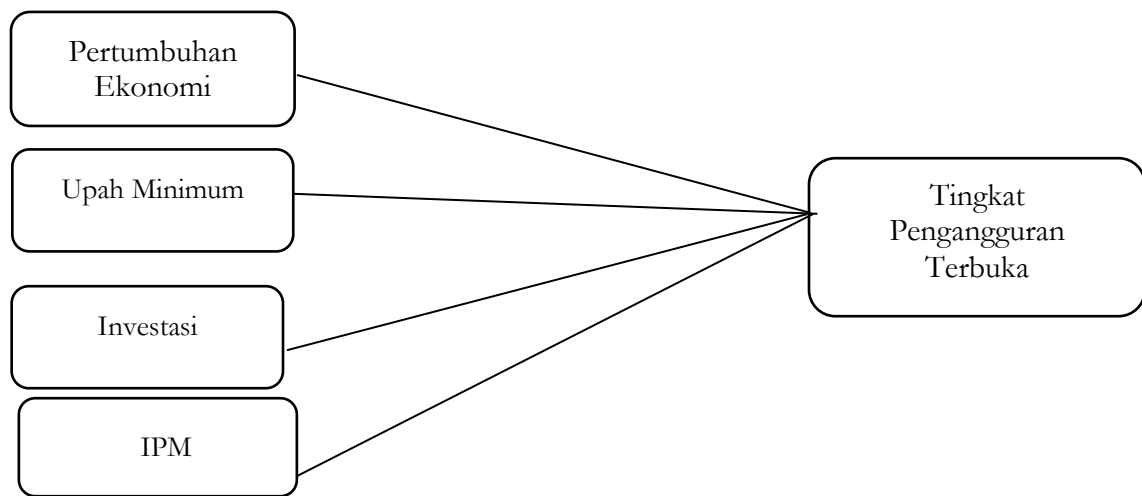
Investasi, baik itu investasi domestik maupun asing, berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-mustafa, (2023) peningkatan investasi dalam sektor-sektor seperti infrastruktur, pariwisata, dan pendidikan dapat menciptakan peluang kerja baru, yang pada akhirnya mengurangi tingkat pengangguran. Di D.I. Yogyakarta, investasi yang diarahkan ke sektor pariwisata dan pendidikan berpotensi untuk membuka lapangan kerja baru dalam bidang perhotelan, transportasi, kuliner, serta sektor pendidikan tinggi. Oleh karena itu, semakin banyak investasi yang masuk ke wilayah ini, semakin besar peluang untuk mengurangi pengangguran, terutama bagi tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh sektor-sektor tersebut.

2.3.4 Hubungan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik, dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang lebih tinggi. Dwiwarman, (2024) menjelaskan bahwa IPM yang lebih

tinggi berhubungan langsung dengan rendahnya tingkat pengangguran, karena pendidikan yang lebih baik meningkatkan keterampilan dan kemampuan individu untuk bersaing di pasar kerja. Di D.I. Yogyakarta, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang tercermin dalam IPM yang lebih tinggi dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap pakai, mengurangi ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Hal ini pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pengangguran di daerah tersebut.

2.4 Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis Utama: H1: Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, 3100 berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di D.I. Yogyakarta.

Hipotesis Spesifik:

1. **H1.1:** Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di D.I. Yogyakarta.
2. **H1.2:** Upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di D.I. Yogyakarta.
3. **H1.3:** Investasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di D.I. Yogyakarta.
4. **H1.4:** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di D.I. Yogyakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan jenis data yang digunakan dalam penelitian serta cara pengumpulannya. Pemilihan jenis data dan metode pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk menghasilkan analisis yang akurat dan relevan. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya (Sugiyono, 2019). Penjelasan rinci tentang jenis data dan cara pengumpulannya adalah sebagai berikut:

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka (Kasmir, 2016). Data kuantitatif ini digunakan untuk menguji hubungan antar variabel yang telah ditetapkan, yaitu pengaruh upah minimum, investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di D.I. Yogyakarta.

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, bukan hasil penelitian langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka: Data tahunan tentang tingkat pengangguran terbuka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) D.I. Yogyakarta.
2. Upah Minimum: Data tahunan mengenai upah minimum yang diterapkan di D.I. Yogyakarta yang dikeluarkan oleh BPS atau Dinas Tenaga Kerja.
3. Investasi: Data tentang jumlah investasi yang masuk ke D.I. Yogyakarta dalam bentuk investasi asing dan domestik yang diterbitkan oleh BPS atau instansi terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Data tahunan tentang perkembangan IPM di D.I. Yogyakarta yang dikeluarkan oleh BPS.

5. Pertumbuhan Ekonomi: Data tentang laju pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta yang diterbitkan oleh BPS yang mencakup informasi mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut.

Data ini bersifat sekunder karena diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti instansi pemerintah dan lembaga statistik, yang memiliki kredibilitas dan keandalan yang tinggi.

3.2 Definisi Variabel Operasional

Pada bagian ini, setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara operasional untuk memastikan pemahaman yang jelas dan konsisten mengenai cara pengukuran dan relevansi variabel tersebut dalam analisis. Definisi operasional membantu menghubungkan teori dengan data yang dapat diukur dalam penelitian, sehingga hasil penelitian dapat lebih terukur dan relevan. Berikut adalah definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1.1 Variabel penelitian dan Definisi Operasional

Dalam kajian ini, variabel yang dipakai dikategorikan menjadi variabel dependen (Y) dan variabel independent(X). Tabel 3.1 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang variable tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1 Variabel Dependen dan Independen

Variabel	Simbol	Satuan	Definisi	Sumber
Tingkat Pengangguran Terbuka	Y	Persen	Persentase dari jumlah penganggur yang tercatat dalam angkatan kerja, yaitu individu yang tidak bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan.	BPS D.I. Yogyakarta

Pertumbuhan Ekonomi	X1	Persen/Tahun	Persentase perubahan tahunan dalam PDRB sebagai cerminan kemampuan daerah menghasilkan barang dan jasa.	BPS D.I. Yogyakarta
Upah Minimum	X2	Rupiah/Bulan	Jumlah gaji minimum yang ditetapkan pemerintah dan wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja per bulan sesuai dengan kebijakan di wilayah tersebut.	BPS dan Dinas Tenaga Kerja D.I. Yogyakarta
Investasi	X3	Juta Rupiah/Tahun	Total nilai dana yang digunakan untuk membiayai proyek ekonomi, baik domestik maupun asing, yang diterima oleh D.I. Yogyakarta setiap tahun.	BPS dan DPMPTSP D.I. Yogyakarta
Indeks Pembangunan Manusia	X4	Persen	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang	BPS

			digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia, mencakup tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Indeks ini dikembangkan oleh UNDP pada tahun 1990 untuk menekankan pentingnya peran manusia dalam pembangunan.	
--	--	--	---	--

3.3 Metode Analisis Data

Pada bagian ini, dijelaskan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini. Metode analisis yang dipilih adalah regresi data panel, yang memungkinkan analisis data yang memiliki dua dimensi: dimensi waktu dan dimensi entitas (misalnya, provinsi atau kabupaten/kota). Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan mencakup *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model yang tepat akan bergantung pada karakteristik data serta pengujian statistik yang dilakukan.

3.3.1 Model Common Effect (CEM)

Common Effect Model (CEM) adalah model dasar dalam analisis data panel yang digunakan ketika data panel tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara

entitas dan waktu. Model ini mengasumsikan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah homogen, artinya tidak ada perbedaan pengaruh antara waktu (tahun) atau entitas (kabupaten/kota).

- **Definisi Operasional:** Dalam model ini, semua unit entitas (misalnya kabupaten/kota) dan periode waktu (misalnya tahun) dianggap seragam dalam hal pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, model ini tidak memperhitungkan perbedaan yang dapat terjadi antar unit atau antar waktu.
- **Penggunaan Model:** *Model Common Effect* ini digunakan pada kasus di mana pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dianggap konstan atau seragam sepanjang waktu dan antar entitas. Oleh karena itu, dalam model ini, tidak ada variabel khusus yang dikontrol untuk perbedaan antar entitas atau waktu.
- **Kelebihan:** Model ini lebih sederhana dan mudah diterapkan karena tidak memerlukan pemisahan perbedaan waktu atau entitas.
- **Kekurangan:** Kekurangan utama dari model CEM adalah tidak mempertimbangkan heterogenitas antar entitas (misalnya antar kabupaten/kota) dan antar waktu, yang dapat mengarah pada hasil yang bias jika perbedaan tersebut memang ada.

3.3.2 Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) digunakan untuk mengatasi masalah perbedaan antar entitas yang tidak terlihat (*unobserved heterogeneity*) yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Dalam model ini, perbedaan antar entitas dianggap tetap atau tidak berubah seiring waktu. *Model Fixed Effect* sangat berguna ketika perbedaan antar entitas yang diamati dianggap konstan dan dapat memengaruhi hasil penelitian.

- **Definisi Operasional:** *Model Fixed Effect* berfokus pada variabel yang berbeda antara entitas (misalnya kabupaten/kota). Dalam hal ini, perbedaan yang ada antara entitas dianggap tetap, dan setiap entitas memiliki intercept yang berbeda (terpisah), sehingga dapat menangkap karakteristik unik masing-masing entitas yang dapat memengaruhi variabel dependen.

- **Penggunaan Model:** *Model Fixed Effect* digunakan ketika peneliti ingin memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sambil mengontrol faktor yang tidak teramati yang bersifat tetap dalam setiap entitas. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara entitas yang tidak teramati dapat memengaruhi hasil, sehingga perbedaan tersebut dimasukkan ke dalam model dengan cara menghilangkan variasi antara entitas melalui differencing.
- **Kelebihan:** *Model Fixed Effect* efektif dalam mengontrol variabel-variabel yang tidak terukur tetapi dapat mempengaruhi variabel dependen, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat.
- **Kekurangan:** Model ini bisa kehilangan sejumlah informasi terkait dengan variasi antar entitas dan tidak dapat mengukur pengaruh variabel yang tetap selama waktu penelitian.

3.3.3 Random Effect Model (REM)

Model Random Effect (REM) digunakan ketika ada variasi yang tidak teramati pada level entitas yang dapat memengaruhi variabel dependen. Model ini berasumsi bahwa perbedaan antar entitas adalah acak dan terdistribusi secara normal. Dengan demikian, variasi tersebut dianggap sebagai bagian dari kesalahan acak dalam model dan bukan sebagai perbedaan yang tetap.

- **Definisi Operasional:** *Model Random Effect* mengasumsikan bahwa perbedaan antara entitas (misalnya kabupaten/kota) merupakan variabel acak yang terdistribusi secara normal dan tidak terkait dengan variabel independen. Dalam model ini, ada *intercept* yang berbeda untuk masing-masing entitas, namun perbedaan antar entitas dianggap sebagai bagian dari kesalahan acak yang tidak sistematis.
- **Penggunaan Model:** *Model Random Effect* digunakan ketika perbedaan antar entitas bersifat acak dan tidak memengaruhi variabel dependen secara sistematis. Model ini lebih fleksibel dibandingkan dengan *Fixed Effect* karena dapat mempertimbangkan variasi acak yang ada dalam data.

- **Kelebihan:** Model ini memungkinkan pengukuran variasi antar entitas dan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam analisis data. REM memungkinkan untuk memasukkan informasi tentang perbedaan antara entitas dalam model.
- **Kekurangan:** *Model Random Effect* tidak dapat menangani variabel yang memiliki pengaruh tetap atau deterministik pada entitas. Jika perbedaan antar entitas adalah akibat faktor tetap yang tidak teramati, model ini dapat menghasilkan estimasi yang bias.

3.4 Pemilihan Model

Pemilihan model yang tepat dalam analisis data panel sangat penting untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan akurat. Setiap model memiliki asumsi yang berbeda tentang data dan pengaruh variabel yang dianalisis, sehingga pemilihan model yang salah dapat mengarah pada estimasi yang bias atau tidak efisien. Dalam penelitian ini, ada tiga model yang dipertimbangkan untuk digunakan, yaitu model *Common Effect (CEM)*, *Fixed Effect (FEM)*, dan *Random Effect (REM)*. Untuk menentukan model mana yang paling tepat, dilakukan pengujian statistik yang komprehensif. Berikut adalah beberapa uji statistik yang digunakan untuk memilih model yang tepat:

3.4.1 Uji Chow (*Chow Test*)

Uji Chow digunakan untuk membandingkan *Common Effect Model (CEM)* dengan *Fixed Effect Model (FEM)*. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam *intercept* (konstanta) antara entitas yang berbeda (misalnya antar kabupaten/kota atau periode waktu yang berbeda). Dalam uji Chow, hipotesis yang diuji adalah apakah *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan *Common Effect Model*, yang diasumsikan tidak memiliki perbedaan antar entitas atau waktu.

- Hipotesis Uji Chow:
 - Hipotesis Nol (H_0): *Model Common Effect* lebih baik daripada *Fixed Effect Model* (tidak ada perbedaan signifikan antar entitas).

- Hipotesis Alternatif (H1): *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Common Effect Model* (terdapat perbedaan signifikan antar entitas).
- Langkah-langkah Uji Chow:
 1. Estimasi model menggunakan *Common Effect Model* (CEM).
 2. Estimasi model menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM).
 3. Bandingkan nilai statistik uji untuk kedua model menggunakan distribusi F untuk menentukan apakah *Fixed Effect Model* signifikan lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Model*.
- Keputusan:
 - Jika nilai $p < 0.05$, maka *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Common Effect Model*, dan hipotesis nol ditolak.
 - Jika nilai $p > 0.05$, maka *Common Effect Model* dapat diterima.

3.4.2 Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM). Uji ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara estimasi parameter yang diperoleh dari kedua model tersebut, sehingga membantu memilih model yang paling tepat berdasarkan karakteristik data.

- Hipotesis Uji Hausman:
 - Hipotesis Nol (H0): *Model Random Effect* lebih baik daripada model *Fixed Effect* (tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua model).
 - Hipotesis Alternatif (H1): *Model Fixed Effect* lebih baik daripada *Random Effect Model* (terdapat perbedaan signifikan antara kedua model).
- Langkah-langkah Uji Hausman:
 1. Estimasi model menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM).
 2. Estimasi model menggunakan *Random Effect Model* (REM).

3. Hitung statistik Hausman yang menguji perbedaan antara estimasi parameter dari kedua model.
 4. Bandingkan hasil statistik dengan distribusi *chi-square* untuk menentukan apakah perbedaan antara estimasi parameter tersebut signifikan.
- Keputusan:
 - Jika nilai $p < 0.05$, maka *Fixed Effect Model* lebih baik daripada model Random Effect, dan hipotesis nol ditolak.
 - Jika nilai $p > 0.05$, maka *Random Effect Model* lebih baik, dan hipotesis nol diterima.

3.4.3 Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk menentukan apakah *Common Effect Model* (CEM) yang lebih sederhana dapat diterima atau apakah perlu menggunakan model yang lebih kompleks seperti *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketergantungan antar entitas yang memerlukan model lebih kompleks, atau jika model sederhana sudah cukup.

- Hipotesis Uji *Lagrange Multiplier*:
 - Hipotesis Nol (H_0): *Common Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* (tidak ada pengaruh spesifik antar entitas yang memerlukan model yang lebih kompleks).
 - Hipotesis Alternatif (H_1): *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* lebih baik daripada *Common Effect Model* (terdapat ketergantungan antar entitas yang memerlukan model yang lebih kompleks).
- Langkah-langkah Uji *Lagrange Multiplier*:
 1. Estimasi *Common Effect Model*.
 2. Uji apakah *Common Effect Model* cukup atau perlu model lebih kompleks (*Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*).

3. Bandingkan nilai statistik uji LM dengan distribusi *chi-square* untuk menentukan apakah model yang lebih kompleks diperlukan.

- Keputusan:

- Jika nilai $p < 0.05$, maka model yang lebih kompleks (*Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*) lebih baik daripada *Common Effect Model*.
- Jika nilai $p > 0.05$, maka *Common Effect Model* sudah cukup digunakan, dan hipotesis nol diterima.

3.5 Pengujian Statistik

Pengujian statistik merupakan bagian penting dalam analisis regresi untuk menilai seberapa baik model yang dipilih dapat menjelaskan data dan memberikan hasil yang dapat dipercaya. Pada penelitian ini, berbagai teknik pengujian statistik digunakan untuk memastikan keandalan dan validitas model yang diterapkan, yaitu Koefisien Determinasi (R^2), Uji F-statistic, dan Uji t-statistik. Berikut adalah penjelasan detail dari masing-masing uji tersebut.

3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R^2 adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model lebih baik dalam menjelaskan variasi data. R^2 dapat diinterpretasikan sebagai persentase variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada dalam model.

- $R^2 = 0$ menunjukkan bahwa model tidak dapat menjelaskan variasi dalam data sama sekali (model tidak baik).
- $R^2 = 1$ menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan seluruh variasi dalam data (model sempurna).

Namun, perlu diingat bahwa R^2 yang lebih tinggi tidak selalu berarti model yang lebih baik. Oleh karena itu, R^2 harus digunakan bersama dengan uji statistik lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas model.

- **Interpretasi R^2 :**
 - R^2 yang tinggi (misalnya, 0,75 atau lebih) menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam data.
 - R^2 yang rendah (misalnya, 0,30 atau kurang) menunjukkan bahwa model tidak cukup baik dalam menjelaskan variasi data dan mungkin perlu diperbaiki dengan menambahkan variabel lain atau menggunakan model yang lebih kompleks.

3.5.2 Uji F-statistic (Uji Kelayakan Model)

Uji F-statistic digunakan untuk menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan, yaitu untuk mengetahui apakah model yang digunakan memberikan penjelasan yang signifikan terhadap variasi dalam variabel dependen. Uji ini menguji hipotesis bahwa semua koefisien regresi dari variabel independen dalam model adalah nol (tidak ada pengaruh).

- **Hipotesis Uji F:**
 - **Hipotesis Nol (H_0):** Semua koefisien regresi dari variabel independen adalah nol (tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen).
 - **Hipotesis Alternatif (H_1):** Setidaknya ada satu koefisien regresi yang berbeda dari nol (setidaknya ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen).
- **Langkah-langkah Uji F-statistic:**
 1. Estimasi model regresi yang mencakup semua variabel independen.
 2. Hitung nilai statistik F dan bandingkan dengan nilai kritis F untuk menentukan apakah model secara keseluruhan dapat diterima.
 3. Periksa nilai **p** untuk uji F. Jika nilai **p** < 0.05, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti model regresi layak dan memberikan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen.
- **Interpretasi:**
 - Jika nilai **p** < 0.05, maka ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa model regresi secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
 - Jika nilai **p** > 0.05, maka model regresi tidak signifikan dan hipotesis nol diterima, yang menunjukkan bahwa model tersebut tidak memberikan penjelasan yang memadai.

3.5.3 Uji t-statistik (Uji Parsial)

Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini menilai apakah koefisien regresi dari masing-masing variabel independen signifikan atau tidak dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen.

- **Hipotesis Uji t:**
 - **Hipotesis Nol (H_0):** Koefisien regresi dari variabel independen adalah nol (tidak ada pengaruh).
 - **Hipotesis Alternatif (H_1):** Koefisien regresi dari variabel independen berbeda dari nol (ada pengaruh yang signifikan).
- **Langkah-langkah Uji t-statistik:**
 1. Estimasi model regresi dan hitung koefisien regresi untuk setiap variabel independen.
 2. Tentukan nilai t-statistik untuk setiap koefisien dan bandingkan dengan nilai kritis t untuk uji dua arah.
 3. Periksa nilai **p** untuk masing-masing variabel independen. Jika nilai **p** < 0.05, maka koefisien regresi untuk variabel tersebut signifikan, dan hipotesis nol ditolak.
- **Interpretasi:**
 - Jika nilai **p** < 0.05, maka koefisien regresi dari variabel independen tersebut signifikan secara statistik, yang berarti variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
 - Jika nilai **p** > 0.05, maka koefisien regresi tidak signifikan, dan variabel independen tersebut tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penjelasan variabel dependen.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Data Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari data *Cross-Section* dan *Time Series* dengan 5 Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta dan pada periode tahun 2014-2024, sehingga total data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 30 data. Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh Upah Minimum, Investasi, IPM, Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta. Dalam penelitian ini pemilihan model metode yang tepat yaitu regresi data panel Metode tersebut yaitu metode *Common Effect*, metode *Fixed Effect*, dan metode *Random Effect*. Ketiga metode tersebut akan diuji dan dicari model yang paling tepat untuk menjelaskan hasil analisis dari penelitian ini.

Uji yang digunakan dalam pemilihan model tersebut yaitu uji Chow (uji F), uji LM, dan uji Hausman. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan alat analisis Eviews 13. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai edisi laporan seperti BPS (Badan Pusat Statistik), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan) Yogyakarta, DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Yogyakarta.

Tabel 4.1 Statistika Deskriptif

Variabel	N	Mean	Standard Deviasi	Min	Max
TPT	132	3,99	1,76	1,49	9,16
PE	132	6,35	2,17	4,54	13,49
Investasi (Rp)	132	$2,6 \cdot 10^{11}$	$4,94 \cdot 10^{11}$	20085000	$2,29 \cdot 10^{12}$
IPM	132	77,69	6,24	67,03	88,89
UMK (Rp)	132	1715827	389285,7	988500	2492997

Sumber : Data Diolah Eviews 13

Berdasarkan hasil perhitungan analisis statistik deskriptif pada tabel di atas dapat mencakup keseluruhan variabel-variabel dalam penelitian ini mulai tahun 2014 sampai tahun 2024. variabel tersebut yaitu tingkat pengangguran, upah minimum, investasi, IPM, Pertumbuhan Ekonomi masing-masing variabel tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

- **Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan rata-rata sebesar 3,99%, dengan nilai tengah (median) 3,78%. Nilai TPT tertinggi mencapai 9,16%, yang mengindikasikan adanya daerah dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi, sementara nilai terendah tercatat sebesar 1,49%, yang menunjukkan daerah dengan kondisi ketenagakerjaan yang lebih stabil. Standar deviasi sebesar 1,76 menunjukkan bahwa variasi tingkat pengangguran antar daerah relatif kecil, menandakan kondisi yang cukup seragam dalam aspek ketenagakerjaan

- **Pertumbuhan Ekonomi (X1)**

Pertumbuhan Ekonomi di daerah yang dianalisis memiliki rata-rata sebesar 6,35%, dengan nilai median 5,47%. Nilai tertinggi mencapai 13,49%, menunjukkan adanya daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, sementara pertumbuhan terendah masih positif di angka 4,54%. Standar deviasi sebesar 2,17 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok dalam tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah, mencerminkan potensi dan tantangan yang berbeda di setiap wilayah.

- **Upah Minimum (X2)**

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) rata-rata berada di angka Rp 1.715.827, dengan nilai median Rp 1.770.000. UMK tertinggi mencapai Rp 2.492.997, sedangkan yang terendah adalah Rp 988.500. Standar deviasi sebesar Rp 389.285,7 menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam tingkat upah minimum antar daerah. Perbedaan ini mencerminkan tingkat biaya hidup serta kondisi ekonomi masing-masing wilayah yang beragam.

- **Investasi (X3)**

Investasi yang masuk ke daerah-daerah yang dianalisis memiliki rata-rata sebesar

Rp 260 triliun, dengan nilai median Rp 12 triliun. Investasi tertinggi yang tercatat mencapai Rp 2.290 triliun, sedangkan nilai investasi terendah hanya sebesar Rp 20,08 juta. Standar deviasi sebesar Rp 494 triliun menunjukkan adanya ketimpangan investasi yang sangat besar antar daerah, yang dapat disebabkan oleh perbedaan daya tarik investasi, infrastruktur, maupun kebijakan ekonomi lokal.

- **Indeks Pembangunan Manusia (X4)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah yang dianalisis memiliki rata-rata sebesar 77,69, dengan nilai median 77,59. Nilai IPM tertinggi tercatat sebesar 88,89, sementara yang terendah adalah 67,03. Standar deviasi sebesar 6,24 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam kualitas pembangunan manusia antar daerah. Hal ini mencerminkan disparitas dalam akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup di berbagai wilayah.

4.2 Estimasi Regresi Data Panel

Dalam melakukan pengolahan data dengan menggunakan regresi data panel terdapat beberapa metode estimasi model yang digunakan, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Dimana dari ketiga model tersebut nantinya akan dipilih satu model yang dianggap paling tepat yang digunakan untuk menganalisis hasil pengolahan data.

Tabel 4.1 Regresi Data Panel

		CEM	FEM	REM
C	<i>Coefficient</i>	0,11940	-1,7281	0,11940
	<i>t(Prob)</i>	0,22870	-2,7719	0,33659
		0,82000	0,0080	0,73780
Pertumbuhan Ekonomi(X1)	<i>Coefficient</i>	0,10673	-0,0819	0,10673
	<i>t(Prob)</i>	1,44170	-0,8894	2,12179
		0,15560	0,3784	0,03880

Upah Minimum (X2)	<i>Coefficient</i>	- 0,06115	0,0016	-0,06115
	<i>t(Prob)</i>	- 3,07323 0,00340	0,0924 0,9268	-4,52297 0,00000
Investasi (X3)	<i>Coefficient</i>	0,58587	1,7130	0,58587
	<i>t(Prob)</i>	2,54449 0,01410	5,6130 0,0000	3,74479 0,0005
Indeks Pembangunan Manusia (X4)	<i>Coefficient</i>	- 0,83616	-0,4118	-0,8362
	<i>t(Prob)</i>	- 6,87469 0.00000	-2,3481 0,0232	-10,118 0,0000
R-squared		0,86010	0,9406	0,8601
Prob (F-statistic)		0.00000	0.0000	0.0000
Pengujian chow		0.0000		
Pengujian hausman			0.0000	

Sumber : Data Diolah Eviews 13

4.2.1 Pengujian Chow

Pengujian Chow berguna untuk memilih model teknik data panel antara efek common dan efek fixed yang dilihat dari hasil uji likelihood Ratio pada Eviews 13.

Hasil pada tabel 4.2 menunjukkan nilai probabilitas Chi-square sebesar $0.00 < \alpha 5\%$ (0.05). Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) ditolak. Maka dapat disimpulkan, model efek fixed lebih baik dibandingkan efek common.

4.2.2 Pengujian Hausman

Pengujian Hausman dipakai untuk memilih antara model efek fixed atau efek random yang lebih baik dan optimal. Hasil yang disajikan pada tabel 4.2 memperlihatkan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < \alpha 5\%$ (0.05). Sehingga H_0 ditolak, yang mana model terbaik adalah model efek fixed.

Dari hasil pengujian dapat ditarik simpulan bahwa model yang terbaik atau tepat dipakai untuk menganalisis Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran terbuka pada variabel dependen (Y) yaitu indeks pembangunan manusia adalah model efek fixed.

4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau R-square (R^2) sebesar 0,9406 hal ini berarti 94,06 % Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu upah minimum, investasi, IPM, pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, sisanya sebesar 5,04 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak termasuk dalam penelitian.

4.4 Pengujian Hasil Persamaan Regresi

4.4.1 Uji F-statistik (Uji Kelayakan Model)

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar $0.000000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$) sehingga menolak hipotesis nol (H_0) dan gagal menolak hipotesis alternatif (H_1). Maka kesimpulannya yaitu berarti variabel upah minimum, investasi, IPM, pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta.

4.4.2 Uji t-statistik (Uji Parsial)

Pengujian dari hasil uji t ini dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai dari probabilitas masing-masing variabel dalam penelitian. Berikut ini uraian dari hasil dari uji t terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian:

4.4.2.1 Variabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -0.081915 dan nilai probabilitas sebesar 0.3784 > 0,05 ($\alpha = 5\%$) sehingga menerima hipotesis nol (H_0) dan menolak hipotesis alternatif (H_1). Kesimpulan yang diperoleh yaitu variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta.

4.4.2.2 Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta

Berdasarkan hasil dari pengolahan data pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel upah minimum sebesar 0,01854 dan nilai probabilitas sebesar 0.9268 > 0,05 ($\alpha = 5\%$) sehingga menerima hipotesis nol (H_0) dan menolak hipotesis alternatif (H_1). Kesimpulannya yaitu variabel rasio upah minimum tidak memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta.

4.4.2.3 Variabel Investasi Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel realisasi investasi sebesar 1,712992 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 < 0,05 ($\alpha = 5\%$) sehingga menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_1). Kesimpulannya yaitu variabel rasio investasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta.

4.4.2.4 Variabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel IPM sebesar -0.411787 dan nilai probabilitas sebesar 0.00232 < 0,05 ($\alpha = 5\%$) sehingga menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_1). Kesimpulan yang diperoleh yaitu variabel IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi D.I.

Yogyakarta.

4.5 Interpretasi Hasil Regresi

Berdasarkan output regresi, persamaan regresi untuk model yang dianalisis adalah:

$$Y = -1,728113 + 1,712992 \cdot \text{INVESTASI} - 0,411787 \cdot \text{IPM} - 0,081915 \cdot \text{PERTUMBUHAN_EKONOMI} + 0,01854 \cdot \text{UPAH_MINIMUM}$$

Keterangan:

- Y: Variabel dependen (Tingkat Pengangguran).
- INVESTASI: Variabel investasi.
- IPM: Indeks Pembangunan Manusia.
- PERTUMBUHAN_EKONOMI: Variabel pertumbuhan ekonomi.
- UPAH_MINIMUM: Variabel upah minimum.

1. Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Hasil regresi juga menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki koefisien regresi -0,081915, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,081915 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan daya serap tenaga kerja. Ketika ekonomi tumbuh, bisnis dan industri berkembang, sehingga permintaan tenaga kerja meningkat dan angka pengangguran menurun. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi pengangguran.

2. Upah Minimum (X2)

Berdasarkan hasil uji statistik yang menggunakan stimasi model *Fixed Effect Model* adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil regresi, variabel Upah Minimum memiliki koefisien regresi sebesar 0,01854, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit upah minimum akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 0,01854 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum dapat berdampak pada naiknya tingkat pengangguran, kemungkinan karena meningkatnya beban biaya tenaga kerja bagi perusahaan sehingga mengurangi daya serap tenaga kerja. Namun, dalam jangka panjang, peningkatan upah minimum juga dapat berkontribusi pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

3. Investasi (X3)

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Investasi memiliki koefisien regresi sebesar 1,712992, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit investasi justru meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 1,712992 unit, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk belum tentu secara langsung menurunkan tingkat pengangguran, terutama jika investasi tersebut bersifat padat modal dan tidak banyak menyerap tenaga kerja. Dalam beberapa kasus, investasi baru mungkin memerlukan waktu sebelum memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, atau mungkin justru menyebabkan efisiensi tenaga kerja yang mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan.

4. IPM (X4)

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki koefisien regresi -0,411787, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit IPM akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,411787 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui akses pendidikan yang lebih baik, peningkatan kesehatan, dan

kesejahteraan masyarakat, dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran. Individu yang memiliki keterampilan lebih tinggi cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau bahkan menciptakan peluang kerja sendiri, sehingga mengurangi jumlah pengangguran di suatu daerah.

4.6 Analisis Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, pengaruh masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat pengangguran Terbuka

Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki koefisien regresi sebesar - 0,081915, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,081915 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi cenderung menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya dikaitkan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa, ekspansi usaha, serta peningkatan permintaan tenaga kerja. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Ardian et al., 2022) yang menemukan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, hal tersebut belum tentu mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara signifikan, dengan hasil uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi 0,092 ($> 0,05$). Selain itu, kondisi seperti ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja (*skill mismatch*), ketimpangan pertumbuhan antar sektor, serta penggunaan teknologi yang menggantikan peran tenaga kerja turut menjadi faktor yang melemahkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Dengan demikian, kualitas dan struktur pertumbuhan ekonomi menjadi aspek yang

lebih penting dalam menciptakan lapangan kerja dibandingkan hanya melihat besar kecilnya pertumbuhan itu sendiri.

2. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat pengangguran Terbuka

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran dengan koefisien regresi sebesar 0,01854. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit upah minimum akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 0,01854 unit, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan kenaikan upah minimum dapat meningkatkan beban tenaga kerja bagi perusahaan, terutama di sektor yang bersifat padat karya, sehingga dapat mengurangi daya serap tenaga kerja. Meskipun peningkatan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya beli masyarakat, dalam jangka pendek kebijakan ini justru dapat menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja atau menggantinya dengan teknologi yang lebih efisien. Hasil ini sejalan dengan penelitian Suriati (2022) di Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa meskipun upah minimum meningkat, variasi kenaikannya kecil dan sering kali tidak sejalan dengan biaya hidup, sehingga tidak cukup kuat dalam mengubah dinamika pengangguran secara signifikan.

3. Pengaruh Investasi terhadap Tingkat pengangguran Terbuka

Variabel Investasi memiliki koefisien regresi sebesar 1,712992, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit investasi justru meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 1,712992 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, yang menandakan bahwa meskipun

investasi meningkat, hal tersebut belum tentu mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Kondisi ini dapat terjadi jika investasi yang masuk lebih banyak diarahkan pada sektor-sektor padat modal seperti pertambangan, infrastruktur, atau industri berteknologi tinggi yang cenderung minim dalam menyerap tenaga kerja lokal. Argumen ini diperkuat oleh penelitian (Amelia & Samsuddin, 2025) yang menemukan bahwa di Provinsi Kalimantan Barat, investasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terbuka dalam jangka panjang. Mereka menjelaskan bahwa meskipun terjadi peningkatan investasi, hal itu tidak otomatis menciptakan lapangan kerja karena karakter investasi yang tidak inklusif dan tidak berorientasi pada sektor padat karya.

4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat pengangguran Terbuka

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki koefisien regresi sebesar $-0,411787$, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit IPM akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar $0,411787$ unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran, terutama melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Namun, dalam beberapa kasus, ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan utama. Seperti yang dikemukakan oleh (Mahesa et al., 2024) Menurunnya presentase tingkat pengangguran terbuka karena IPM yang meningkat, menunjukkan bahwa IPM dapat meningkatkan akses pendidikan yang lebih baik, peningkatan kesehatan masyarakat, dan peningkatan standar hidup. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran terbuka karena adanya peningkatan keterampilan dan pendidikan masyarakat, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan

pekerjaan. Jadi, berdasarkan hasil regresi data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan evaluasi regresi *Fixed Effect Model*, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, yang mengindikasikan bahwa peningkatan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup untuk mengurangi pengangguran.
2. Upah Minimum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum belum memberikan dampak langsung terhadap perubahan angka pengangguran.
3. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Peningkatan investasi tidak selalu diikuti oleh peningkatan lapangan pekerjaan, kemungkinan karena sifat investasi yang lebih banyak mengarah pada sektor padat modal dibandingkan padat karya.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dapat mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, berikut beberapa saran untuk perbaikan kebijakan dan penelitian selanjutnya:

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** pemerintah daerah perlu mengalihkan fokus dari sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi menuju arah pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Kebijakan ekonomi sebaiknya diarahkan pada sektor-sektor yang bersifat padat karya, seperti UMKM, pertanian modern, atau industri kreatif yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencerminkan peningkatan output, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja nyata yang menurunkan tingkat pengangguran.
2. **Upah Minimum:** kebijakan pengupahan perlu dievaluasi tidak hanya dari segi besaran, tetapi juga dari keterkaitan dengan produktivitas dan kepatuhan implementasi. Pemerintah daerah dan pusat sebaiknya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum, khususnya pada sektor informal dan usaha mikro kecil. Selain itu, diperlukan program pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar kenaikan upah sejalan dengan peningkatan produktivitas, sehingga tidak membebani dunia usaha dan tetap kondusif dalam menciptakan lapangan kerja.
3. **Investasi:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, yang mengindikasikan bahwa investasi yang masuk cenderung belum inklusif atau belum diarahkan pada sektor padat karya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki iklim investasi dengan memberi insentif dan kemudahan bagi investasi di sektor-sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, seperti manufaktur ringan, pariwisata, dan pertanian berteknologi. Selain itu, kebijakan fiskal dan perizinan juga harus diarahkan

untuk mendorong investasi yang berkelanjutan dan ramah tenaga kerja lokal.

4. Indeks Pembangunan Manusia: pentingnya kebijakan yang fokus pada pembangunan manusia sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah disarankan untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial guna meningkatkan kapabilitas dan keterampilan angkatan kerja. Dengan meningkatkan IPM secara merata antar wilayah, maka peluang kerja akan lebih mudah diakses oleh masyarakat, dan risiko pengangguran dapat ditekan melalui kesiapan tenaga kerja yang lebih baik menghadapi dinamika pasar kerja modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, Hafiz, P., Istiqomah, K., Putra Hafiz, A., & Saputra, A. H. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan CustomerService Dan Kepuasan Nasabah TerhadapLoyalitas Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas IAINSulthanThaha Saifuddin Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 268–286. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i1.706>
- Al-mustafa, M. (2023). *Konsep Investasi Menurut Ekonomi Syariah di Era Milenial*. 02, 1–2.
- Amelia, S. N., & Samsuddin, M. A. (2025). *Pengaruh Konsumsi dan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Barat Periode 1995-2024*.
- Anita, & Jessica. (2023). Corporate Social Responsibility dan Kinerja Perusahaan : Financial Slack sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7, 2771–2785.
- Ardian, R., Syahputra, M., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 190–198. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v1i3.90>
- Assanniyah, M., & Setyorini, H. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM Kecamatan Tanggulangin. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 9(1), 36–49. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v9i1.3917>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari bps.go.id.
- Bato, A. R. (2023). *Efek PDRB, Pengeluaran Pemerintah, dan Inflasi terhadap Pengangguran di Kabupaten Bone*. 3, 145–159.
- Dwiwarman, D. A. (2024). *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Keterampilan Soft Skills Dan Hard Skills*. 13(September), 1538–1549.
- Erdiansyah, E., Hendri, E., & Setiawan, A. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Di PT. Golden Blossom Sumatera (GBS). *Jurnal Manajemen Dan Investasi (MANIVESTASI)*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.31851/jmanivestasi.v4i1.10276>
- Firdaus, A. A., Oktaviani, C. P., Hidayatullah, M. A., Puspitarini, S., Andarini, S., & Kusumasari, I. R. K. (2024). Pentingnya inovasi dalam perencanaan dan pengembangan bisnis. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(1), 1–5.
- Gedeona, H. T. (2011). *Analisis Kebijakan Masalah*. VIII(2), 212–231.
- Husain, M. Y., Siva, F., Al, H., Rizal, M., Habibi, Z., Brahmana, R., Achmad, M., Halidaziya, N., & Althof, M. D. (2024). *Investasi Syariah : Kontribusi Terhadap Ketahanan*

Sosial Dan Ekonomi Umat di Indonesia. 4, 41–52.

Indryani, R. I., Nadila, L., Wulandari, E., & Septiani, A. (2024). Pengelolaan Dana Pensiun Yang Efektif dan Efisien dalam Menjamin Kesejahteraan Keuangan di Masa Tua. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 3(3), 180–186.

Jainurakhma, J., Mahardhani, A. J., Brata, D. P. N., Widiatsih, A., Suryadi, I., Hendrowati, T. Y., Tamam, B., Tukiyo, Daryono, Wahidah, F., Haryati, S., Mustari, M., Wicaksana, E. J., & Dumiyati. (2023). Manajemen Pendidikan Tinggi Pasca Pandemi. In *Widina Bhakti Persada: Bandung* (Issue Februari). <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/559122-manajemen-pendidikan-tinggi-pasca-pandem-ec8f4379.pdf#page=28>

Kasmir. (2016). *Metodologi Penelitian untuk Ilmu Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*. Rajawali Pers.

Mahesa, G. P., Khairunnisa, N., & Rohmi, M. L. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2011-2020. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 1(4), 01–18. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.112>

Muhammad Hafizd Fauzi, Sri Diana Putri, Rahma Agustina Fadhilah, Mirna Kurniati, Annisa Rizki Pebriani, Muhamad Raihan Eka Putra, & Rama Wijaya Abdul Rozak. (2024). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Dalam Pengelolaan Finansial Pribadi Mahasiswa. *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1(2), 37–50. <https://doi.org/10.61132/apke.v1i2.74>

Mulyadi, M. (2022). *Sociological Perspectives on Social Solidarity*. University Press.

NAIBORHU, I. K., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Marketplace, Kecerdasan Adversitas Terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Unesa Melalui Efikasi Diri. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(2), 107–124. <https://doi.org/10.26740/jepk.v9n2.p107-124>

Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>

Nugraheni, A. U., & Septiarini, D. F. (2017). Pengaruh Equivalent Rate, Profitabilitas, dan Jumlah Kantor Terhadap Dana Pihak Ketiga BPRS di Indonesia (Periode Tahun 2013-2015). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(11), 875. <https://doi.org/10.20473/vol4iss201711pp875-888>.

Priatna, H. (2016). Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Rasio Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (Akurat)*, 7(2), 44–53.

Putri, S. A., Abdullah, F., Alfandi, R., & Elma, P. (2024). *Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing Perusahaan*. 2(1).

- Rahmadini, A. (2023). *Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Akuntansi*. 1(4).
- Rahmawati, I. S. (2023). Evaluasi Program Pendidikan: Tinjauan Terhadap Efektivitas dan Tantangan. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 128–136. <https://doi.org/10.19109/elidare.v9i2.20229>
- Riantoni, I. A., Manajemen, P. S., Bengkulu, U., Institutional, K., Independen, K., Ownership, I., & Commissioners, I. (2023). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Investasi R & D Dengan Financial The Effect Of Corporate Governance On R & D Investment With Financial Slack As A*. 09(02), 234–251.
- Sahputri, A., Fitriani, A. D., & Nur'ani. (2024). Faktor yang Berhubungan dengan Motivasi Kerja Perawat Pelaksana di Ruang Rawat Inap RSUD dr. Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023. *Jurnal Ners*, 8(1), 338–346.
- Sanyoto, E., Hidayat, Y., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Optimalisasi Investasi Dana Pensiun Milik Negara. *Binamulia Hukum*, 12(2), 417–427. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.607>
- Saputri, E. R., & Erdi, T. W. (2023). *Perilaku keuangan , dan locus of control , memengaruhi keputusan investasi dengan literasi keuangan sebagai moderasi*. 5(12), 1–13.
- Seventeen, W. L., Arnova, I., & Fitriano, Y. (2023). Pengaruh Faktor Demografis (Usia, Jenis Kelamin, dan Penghasilan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1221–1226. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.3971>
- Sinurat, A., Panjaitan, P. D., & Sinurat, M. (2022). *Pendapatan Komuter Berpengaruh Terhadap konsumsi Dan Tabungan Keluarga Di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun (Perspektif Pengembangan Wilayah)*. 112–129.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Re&D*. Alfabeta.
- Suriati. (2020). Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja, Upah Minimum dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pembangunan Dan Pemerataan*, 10(3), 5.
- Susanti, R. (2021). *Social Solidarity and Community Development*. Universitas Indonesia.
- Suwardjono. (2017). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. 87(3), 355–374.
- Ulya, Z., Yahya, M., & Anggrainingsih, D. W. (2022). Pengaruh promosi, motivasi, dan biaya administrasi terhadap keputusan masyarakat memilih produk tabungan emas. *Jurnal Investasi Islam*, 6(2), 173–186. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i2.3735>.
- Ummah, M. S. (2019). Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel – Dampak Ekonomi dan Kesehatan dari Industri Nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbec>

o.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

- Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 6(2), 1–9. <https://doi.org/10.54783/japp.v6i2.726>.
- Widiyanto, D., Istiqomah, A., & Yasnanto, Y. (2021). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 26. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v2i1.3621>.
- Yelvianti 'Tumba' Makko', & Abedneigo Carter Rambulangi. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Untuk Promosi Pariwisata Dan Potensi Kearifan Lokal Di Kolam Alam 'Tilanga' Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 1(4), 20–33. <https://doi.org/10.59024/jumek.v1i4.213>
- Yokoyama, E. P., & Mahardika, D. P. K. (2019). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan). *Jimea*, 3(2), 28–44. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss2.pp>
- Yokoyama, E. P., & Mahardika, D. P. K. (2019). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan). *Jimea*, 3(2), 28–44. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss2.pp>.

LAMPIRAN :

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 03/18/25 Time: 04:37
Sample: 2014 2024
Periods included: 11
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.119398	0.522069	0.228701	0.8200
X1	0.106727	0.074028	1.441700	0.1556
X2	-0.061147	0.019897	-3.073233	0.0034
X3	0.585873	0.230252	2.544486	0.0141
X4	-0.836162	0.121629	-6.874686	0.0000
R-squared	0.860098	Mean dependent var	0.784000	
Adjusted R-squared	0.848906	S.D. dependent var	0.118971	
S.E. of regression	0.046245	Akaike info criterion	-3.223219	
Sum squared resid	0.106930	Schwarz criterion	-3.040734	
Log likelihood	93.63851	Hannan-Quinn criter.	-3.152650	
F-statistic	76.84815	Durbin-Watson stat	1.518487	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.574834	(4,46)	0.0000
Cross-section Chi-square	47.094170	4	0.0000

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/18/25 Time: 04:38
 Sample: 2014 2024
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.728113	0.623438	-2.771911	0.0080
X1	-0.081915	0.092103	-0.889389	0.3784
X2	0.001584	0.017143	0.092417	0.9268
X3	1.712992	0.305184	5.612984	0.0000
X4	-0.411787	0.175368	-2.348134	0.0232

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.940577	Mean dependent var	0.784000
Adjusted R-squared	0.930242	S.D. dependent var	0.118971
S.E. of regression	0.031422	Akaike info criterion	-3.934022
Sum squared resid	0.045418	Schwarz criterion	-3.605549
Log likelihood	117.1856	Hannan-Quinn criter.	-3.806999
F-statistic	91.01345	Durbin-Watson stat	2.463802
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/18/25 Time: 04:39
 Sample: 2014 2024
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 55
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.119398	0.354732	0.336585	0.7378
X1	0.106727	0.050300	2.121792	0.0388
X2	-0.061147	0.013519	-4.522966	0.0000
X3	0.585873	0.156450	3.744794	0.0005
X4	-0.836162	0.082644	-10.11768	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.49E-07	0.0000
Idiosyncratic random		0.031422	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.860098	Mean dependent var	0.784000
Adjusted R-squared	0.848906	S.D. dependent var	0.118971
S.E. of regression	0.046245	Sum squared resid	0.106930
F-statistic	76.84815	Durbin-Watson stat	1.518487
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.860098	Mean dependent var	0.784000
Sum squared resid	0.106930	Durbin-Watson stat	1.518487

Data penelitian

N o	Kabupaten / Kota	Tah un	PE	UMK	INVESTASI	IP M	TPT
1	Kabupaten Bantul	2014	4,54	1.125.500	20.085.000	77,1 1	9,16
		2015	4,62	1.297.700	171.585.769	78,4 2	7,18
		2016	4,57	1.237.700	159.027.019	77,5 9	9,13
		2017	4,97	1.805.000	1.086.724.608	80,4 5	5,72
		2018	4,76	1.498.500	184.496.899	78,6 7	6,35
		2019	5,01	1.916.848	1.203.955.418	81,0 4	5,70
		2020	4,82	1.649.800	876.985.938	79,4 5	6,22

		2021	5,03	2.022.000	3.745.427.680	82,7 8	5,63
		2022	4,88	1.790.500	1.057.179.188	80,0 1	6,07
		2023	5,04	2.216.463	4.440.742.992	73,9 0	5,52
		2024	5,04	2.022.000	4.239.757.108	83,0 1	5,62
2	Kabupaten Gunung Kidul	2014	5,05	988.500	4.942.632.592	67,0 3	5,49
		2015	5,05	1.108.249	4.944.506.345	67,4 1	5,37
		2016	5,05	1.235.700	5.118.644.980	67,8 2	5,17
		2017	5,09	1.382.000	5.214.691.325	68,7 3	5,09
		2018	5,09	1.571.000	5.307.427.290	69,2 4	5,08
		2019	5,10	1.705.000	5.782.516.798	69,9 6	4,80
		2020	5,11	1.763.000	6.269.272.910	70,0 3	4,78
		2021	5,16	1.900.000	6.731.924.585	70,7 8	4,47

3	Kabupaten Kulon Progo	2022	5,18	1.900.000	6.806.993.910	71,5 4	4,47
		2023	5,22	1.900.000	7.500.000.000	72,3 4	4,40
		2024	5,24	2.188.041	7.634.317.385	72,1 4	4,21
		2014	5,28	1.069.000	8.000.000.000	70,6 8	4,06
		2015	5,30	1.173.000	8.500.000.000	71,5 2	4,04
		2016	5,33	1.268.870	9.000.000.000	72,3 8	3,97
		2017	5,34	1.373.700	10.651.401.198	73,2 3	3,97
		2018	5,45	1.613.200	11.000.000.000	73,7 6	3,93
		2019	5,47	1.750.500	12.000.000.000	74,4 4	3,78
		2020	5,49	1.770.000	13.000.000.000	74,8 6	3,78
		2021	5,53	1.904.275	57.500.940.000	75,0 2	3,72
		2022	5,78	1.904.275	84.358.098.854	75,8 9	3,71
		2023	5,87	1.904.275	84.560.700.000	76,0 9	3,69

		2024	5,96	2.207.736	104.835.000.00 0	76,1 8	3,51
4	Kabupaten Sleman	2014	5,97	1.127.000	112.000.000.00 0	80,7 3	3,12
		2015	6,01	1.243.700	122.000.000.00 0	81,2 0	3,06
		2016	6,01	1.338.000	122.927.304.30 1	82,1 5	3,00
		2017	6,23	1.572.200	134.794.370.59 6	82,8 5	2,90
		2018	6,23	1.701.000	159.028.000.00 0	83,4 2	2,88
		2019	6,30	1.846.000	185.647.839.75 8	83,8 5	2,80
		2020	6,42	1.903.500	632.850.000.00 0	84,7 8	2,80
		2021	6,45	2.001.000	611.263.000.00 0	84,6 5	2,72

		2022	6,49	2.153.000	486.380.000.00 0	85,7 2	2,57
		2023	6,73	2.153.000	475.350.674.95 0	86,6 5	2,40
		2024	6,78	2.315.976	394.800.000.00 0	80,2 2	2,40
5	Kota Yogyakarta	2014	6,78	1.173.300	354.780.000.00 0	70,0 2	2,20
		2024	13,4 9	2.492.997	2.290.000.000.0 00	88,8 9	1,49
		2015	6,98	1.302.500	282.834.898.12 9	70,8 4	2,16
		2016	12,9 8	2.324.775	2.230.000.000.0 00	87,7 7	1,61
		2017	7,85	1.452.400	237.570.000.00 0	74,0 5	2,09
		2018	12,8 3	2.324.775	1.416.270.000.0 00	86,6 5	1,65

		2019	7,90	1.709.150	216.272.273.20 2	83,7 8	2,08
		2020	11,3 4	2.153.970	875.980.589.19 3	86,1 1	1,80
		2021	8,21	1.846.400	727.122.758.80 4	84,5 6	2,07
		2022	10,8 4	2.069.530	867.600.000.00 0	85,4 9	1,92
		2023	10,0 9	2.004.000	862.400.000.00 0	85,3 2	1,99

